

# **MOTIF DAN AKIBAT PERCERAIAN DI KALANGAN KEPOLISIAN**

**(Studi Kasus Perceraian anggota Kepolisian di Jajaran Sektor Kuantan  
Mudik Ditinjau dari Hukum Islam)**

## **SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas dan Memenuhi Syarat-syarat  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Islam**



**DANU ALTRIARA**  
**NIM : 10321022431**

**PROGRAM S1  
JURUSAN    AHWAL AL-SYAKHSHIYAH**

**FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SULTAN SYARIF KASIM  
RIAU  
2011**

## ABSTRAK

Skripsi ini berjudul “MOTIF DAN AKIBAT PERCERAIAN DI KALANGAN KEPOLISIAN (Studi Kasus Perceraian anggota Kepolisian di Jajaran Sektor Kuantan Mudik Ditinjau dari Hukum Islam)” , dengan latar belakang bahwa Kepolisian sebagai Institusi yang disorot langsung oleh masyarakat, apalagi institusi POLRI saat ini dalam masa-masa pembenahan menuju kemandirian Polri setelah berpisah dari ABRI.

Lokasi penelitian ini adalah : Polres Kuantan Singingi Sektor Kuantan Mudik, alasan penulis meneliti ialah, dikarenakan Polisi adalah aparaturnya negara yang berinteraksi langsung dengan masyarakat, dan juga diikuti terjadinya beberapa kasus perceraian.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui : **Pertama**, Untuk mengetahui motif anggota Kepolisian Resor Kuantan Singingi Sektor Kuantan Mudik melakukan perceraian. **Kedua**, Untuk mengetahui akibat yang timbul apabila anggota Kepolisian Resor Kuantan Singingi Sektor Kuantan Mudik melakukan perceraian. **Ketiga**, Untuk mengetahui bagaimana Tinjauan Hukum Islam tentang Perceraian di kalangan anggota Kepolisian.

Tipe penelitian ini adalah Penelitian yang merupakan studi kasus dan lapangan (*Case study Reserch and Field Study Reserch*). Metode penulisan dalam penelitian ini adalah Induktif, Deduktif, Deskriptif. Sedangkan data Primer diperoleh dari wawancara anggota Polsek Kuantan mudik, data sekunder diperoleh dari buku-buku, literature, internet yang berhubungan dengan penelitian ini.

Motif anggota Polsek Kuantan mudik melakukan perceraian dan akibat perceraian itu sendiri terhadap keluarga, terhadap Kepolisian. Analisis hukum Islam tentang motif dan akibat perceraian. Dari penelitian ini didapati, Penugasan Anggota yang berhubungan langsung dengan dunia kejahatan dan maksiat sedikit banyaknya mempengaruhi pola pikir, sikap, dan perilaku anggota itu sendiri. Anggota Kepolisian yang bercerai enggan untuk melaporkan perceraian mereka, mengurus perceraian mereka, dan dilakukan tidak di hadapan hakim.

## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK .....</b>	<b>i</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>ii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>vi</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>viii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>ix</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	<b>x</b>
 <b>BAB I      PENDAHULUAN .....</b>	 <b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Batasan Masalah .....	4
C. Perumusan Masalah .....	4
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....	5
E. Metode Penelitian .....	6
F. Sistematika Penulisan .....	9
 <b>BAB II      GAMBARAN UMUM KEPOLISIAN .....</b>	 <b>10</b>
A. Pengertian Kepolisian .....	10
B. Pengertian Istilah .....	14
C. Sejarah Perkembangan Kepolisian dan Struktur Organisasi Kepolisian .....	 16
D. Tugas-tugas Kepolisian .....	25
E. Kemandirian Polri.....	31
F. Kepolisian .....	46
1. Polisi Sebagai Manusia.....	46
2. Polisi Sebagai Anggota Masyarakat .....	47
3. Polisi Sebagai Abdi Masyarakat .....	47
 <b>BAB III      PERCERAIAN MENURUT HUKUM ISLAM .....</b>	 <b>57</b>
A. Pengertian dan Kedudukan Perceraian .....	57
B. Perkembangan Alasan Perceraian.....	62
C. Motiv Perceraian.....	65
D. Akibat yang Ditimbulkan Perceraian.....	67

<b>BAB IV</b>	<b>PERCERAIAN DI KALANGAN KEPOLISIAN DAN HUKUM ISLAM .....</b>	<b>74</b>
	A. Motiv Perceraian Anggota Kepolisian Sektor Kuantan Mudik.....	74
	B. Akibat Perceraian Anggota Kepolisian Sektor Kuantan Mudik.....	80
	C. Analisis .....	83
<b>BAB V</b>	<b>KESIMPULAN DAN SARAN.....</b>	<b>91</b>
	A. Kesimpulan .....	91
	B. Saran .....	92
	<b>DAFTAR KEPUSTAKAAN .....</b>	<b>93</b>
	<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>95</b>
	<b>BIOGRAFI .....</b>	<b>96</b>

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

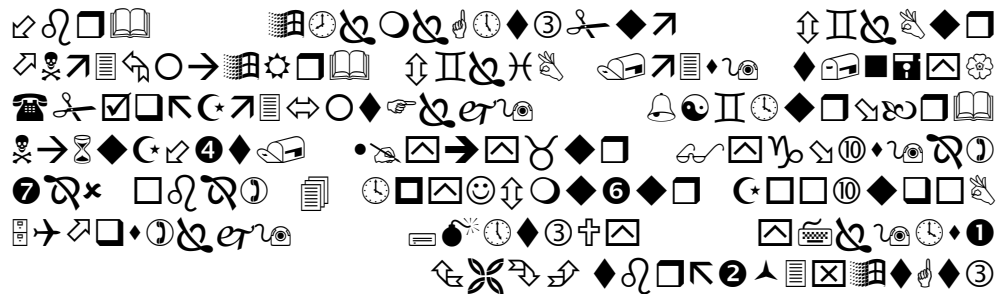
Kepolisian adalah aparaturnya Negara yang bertugas memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat; menegakkan hukum; dan memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat .<sup>1</sup> KEPOLISIAN terdiri dari sejumlah KORPS (satuan) diantaranya: korps RESERSE, korps INTEL, korps LANTAS, korps SAMAPTA, korps DOKPOL, korps AIRUD, korps BRIMOB dan korps PROVOST.

Kepolisian adalah institusi kemiliteran dan identik dengan kedisiplinan namun tidak menutup kemungkinan terjadinya masalah rumah tangga kepada anggota personilnya. Pernikahan adalah awal pembentukan keluarga dalam ruang lingkup rumah tangga. Ia merupakan pintu masuk yang menghubungkan seseorang dengan kehidupan dunia yang sesungguhnya sebagai insan yang sempurna. Sedangkan rumah tangga yang Islami adalah basis pertama dari masyarakat yang berdiri di atas dasar dan kecintaan dan kasih sayang. Ikatan rumah tangga lebih kuat dan kokoh daripada ikatan-ikatan lainnya yang terdapat dalam kehidupan masyarakat.

---

<sup>1</sup> Undang-undang Kepolisian Negara, (UU RI NO.2 TH. 2002) Pasal 13

Sesuai dalam ayat Al – Qur'an dalam surat Al – Ruum ayat 21



Artinya : “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”. (QS. Al – Ruum : 21)<sup>2</sup>

Oleh karenanya, tatanan hidup dalam rumah tangga hendaknya dibangun atas dasar rasa cinta kasih dan saling pengertian di antara kedua belah pihak.<sup>3</sup> Namun terkadang sebuah pernikahan yang kokoh dan dilandasi dengan rasa cinta dan kasih yang pada awalnya begitu indah, namun bisa saja bercerai dikarenakan berbagai permasalahan di dalam kehidupan rumah tangga yang kompleks dan banyak faktor lain yang menyebabkan sebuah pernikahan terancam bercerai.

Beberapa kasus di atas menjadi motivasi bagi penulis untuk mendalami permasalahan sistem perceraian Kepolisian, yang penjelasan lebih lanjut akan dipaparkan dalam bentuk skripsi.

Perceraian ataupun disebut dengan Thalaq ialah melepaskan ikatan nikah dari pihak suami dengan mengucapkan lafaz tertentu, yang misalnya

<sup>2</sup> Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahannya, (Semarang : CV. Toha Putra, t. th ), h. 644

<sup>3</sup> Drs. K.H. Muslim Nurdin. dkk, *Moral dan Kognisi Islam*, (Jawa Barat : CV. ALFABETA, 2001), Edisi Revisi, h. 122.



Perceraian yang selama ini diketahui publik hanyalah proses perceraian yang dilalui oleh masyarakat biasa yang notabennya sesuai dengan PP No. 9 Th. 1975 yang tidak begitu rumit prosesnya, sedangkan pada militer ada sistem yang harus dilewati sebelum mencapai peradilan agama ataupun umum bagi non muslim. Karena alasan inilah penulis bermaksud memberitahu khalayak ramai tentang bagaimana prosedur perceraian yang harus dilalui oleh seorang anggota Kepolisian yang ingin bercerai dan juga menjadi syarat kelulusan penulis dalam penyelesaian Program S1.

## **B. Batasan Masalah**

Untuk lebih terarahnya penelitian ini, maka penulis membatasi permasalahan yang akan diteliti. Dalam penelitian ini penulis meneliti tentang Motif dan Akibat perceraian Kepolisian Resor Kuantan Singingi Sektor Kuantan Mudik (ditinjau dari Hukum Islam).

## **C. Perumusan Masalah**

Berdasarkan pembatasan masalah di atas, maka yang menjadi masalah di penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Apa motif anggota Kepolisian Resor Kuantan Singingi Sektor Kuantan Mudik melakukan perceraian?



- b. Bagaimana akibat yang timbul apabila anggota Kepolisian Resor Kuantan Singingi Sektor Kuantan Mudik melakukan perceraian?
- c. Bagaimana Tinjauan Hukum Islam tentang Perceraian Anggota di jajaran Kepolisian Resor Kuantan Singingi Sektor Kuantan Mudik?

#### **D. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian**

##### **1. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui motif anggota Kepolisian Resor Kuantan Singingi Sektor Kuantan Mudik melakukan perceraian.
- b. Untuk mengetahui akibat yang timbul apabila anggota Kepolisian Resor Kuantan Singingi Sektor Kuantan Mudik melakukan perceraian.
- c. Untuk mengetahui bagaimana Tinjauan Hukum Islam tentang Perceraian di kalangan anggota Kepolisian.

##### **2. Kegunaan Penelitian**

Adapun kegunaan penelitian ini adalah:

- a. Agar dapat memberikan informasi dan gambaran tentang motif dan akibat perceraian anggota Kepolisian kepada khalayak ramai.
- b. Penulisan ini diharapkan dapat diterima sebagai syarat untuk meraih gelar sarjana pada fakultas Syaria'ah Dan Ilmu Hukum di Universitas Islam Negri Sultan Syarif Kasim Pekanbaru.

- c. Untuk menambah wawasan dan pengetahuan peneliti tentang motif dan akibat Perceraian di kalangan Kepolisian.
- d. Sebagai sumbangan atas sebuah pemikiran penulis terhadap ilmu pengetahuan umum, dan ilmu syari'ah khususnya yang sekaligus ikut andil dalam melengkapi bahan rujukan yang berhubungan dengan hukum Islam.

## **E. Metode Penelitian**

### **1. Lokasi penelitian**

Penelitian ini merupakan studi kasus dan dilaksanakan di Markas Kepolisian Resor Kuantan Singingi, Sektor kuantan mudik alasan pemilihan lokasi ini adalah :

- a. Karena sampai saat ini masyarakat umum di kabupaten Kuantan Singingi belum terlalu mengenal prosedur Perceraian di kalangan Polisi khususnya di kalangan Kepolisian Resor Kuantan Singingi.
- b. Karena permasalahan yang ada di kalangan Polisi cenderung tertutup.
- c. Karena Kepolisian Resor Kuantan Singingi Sektor Kuantan Mudik menjadi suatu icon sipil yang dipersenjatai yang mengayomi masyarakat.
- d. Karena lokasi ini mudah dijangkau.

### **2. Subjek dan Objek Penelitian**

Adapun yang menjadi subjek penelitian ini adalah anggota Kepolisian yang telah bercerai dan yang menjadi objek penelitian adalah proses Motif dan Akibat Perceraian anggota Kepolisian Resor Kuantan Singingi.

### 3. Sumber Data

Data dari informasi yang diteliti dalam penelitian ini ada dua, yaitu: **Data Primer** dan **Data Skunder**. Data Primer diperoleh dari anggota Kepolisian yang diwawancarai dan data Sekunder diperoleh dari Literatur yang berhubungan dengan penelitian ini.

### 4. Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah anggota Kepolisian yang melakukan perceraian sebanyak 4 orang pada tahun 2009 dengan persentasi lebih kurang enam belas persen dari jumlah personil di Jajaran Resor Kuantan Singingi, Sektor Kuantan Mudik. Dengan total anggotanya 30 orang berdasarkan data Komposisi Personel Kepolisian Resor Kuantan Singingi Periode Bulan April 2010. Dan diikuti 5 arang lainnya, yaitu Ka.Polsek, orang tua yang melakukan perceraian, dan orang dekat, yang bersangkutan.

### 5. Teknik Pengumpulan Data

#### a. Observasi

Penulis mengadakan pengamatan langsung ke lapangan untuk meneliti tentang Motif dan Akibat dari Perceraian di jajaran Kepolisian Resor Kuantan Singingi.

b. Wawancara

Yaitu: penulis melakukan Tanya jawab terhadap beberapa anggota Kepolisian di jajaran Kepolisian Resor Kuantan Singingi Sektor Kuantan Mudik yang melakukan perceraian.

## **6. Analisa Data**

Setelah semua data yang diperlukan telah dapat dirangkum, maka penulis menganalisa data tersebut dengan menggunakan metode kualitatif, yaitu: data-data yang telah terkumpul melalui wawancara, observasi, dan angket dideskripsikan secara Inferensial baik melalui perbandingan data-data yang diperoleh.

## **7. Metode Penulisan**

a. Deskriptif

Yaitu, gambaran data dan fenomena yang diperoleh dari hasil penelitian lapangan secara apa adanya melalui pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif.

b. Deduktif

Yaitu, penulis menguraikan data yang bersifat umum kemudian disilogismekan untuk mendapatkan kesimpulan yang bersifat khusus.

c. Induktif

Yaitu, penulis menguraikan data-data yang bersifat khusus digeneralisasikan untuk mendapatkan kesimpulan yang bersifat umum.

## **F. Sistematika Penulisan**

Sebagai kerangka penelitian ini, penulis menyusun sistematika sebagai berikut:

**BAB I** : Pendahuluan yang terdiri dari Latar Belakang, Batasan Masalah, Tujuan dan Kegunaan, Metode Penelitian, dan Sistematika Penulisan.

**BAB II** : Gambaran profil Markas Kepolisian Resor Kuantan Singingi, dan Proses Perceraian yang harus dijalani oleh anggota Kepolisian Resor Kuantan Singingi. Yang terdiri dari Syarat Administrasi, Pemeriksaan dan Penetapan.

**BAB III** : Tinjauan Umum tentang Perceraian anggota Kepolisian, yang terdiri ; pada jenis kasus, tindakan yang diambil kedinasan, keputusan yang diberikan, bagaimana pelaksanaan keputusan.

**BAB IV** : Prosedur perceraian yang harus dilalui oleh seorang anggota Kepolisian Resor Kuantan Singingi Sektor Kuantan Mudik ditinjau menurut Hukum Islam, dan sejumlah kendala yang dihadapi dalam proses perceraian. Serta Tinjauan Peraturan Perkawinan Khusus untuk Anggota POLRI.

**BAB V** : Kesimpulan dan Saran.

**DAFTAR PUSTAKA****LAMPIRAN**

## **BAB II**

### **GAMBARAN UMUM KEPOLISIAN**

#### **A. PENGERTIAN KEPOLISIAN**

Kepolisian dengan kaca-mata filsafat, maksudnya mempersoalkan perihal kepolisian dengan kesadaran ingin tahu sedalam-dalamnya mencari kebenaran untuk kebenaran, dengan pikiran radikal, sistematis dan universal, oleh karena ilmu kepolisian dalam filsafat mengandung apa yang dinamakan pengertian-pengertian pertama dan sendi-sendi pertama.<sup>1</sup>

Pertama-tama kita ingin mengetahui apakah yang disebut polisi itu? Berpikir secara biasa saya kira tidak ada seorangpun di antara kita ini yang belum mengetahui polisi, lebih-lebih yang dari kota.

Atau kita perhatikan gambaran mereka tentang polisi bermacam-macam, misalnya seseorang memakai baju seragam dril coklat yang berdiri di tengah-tengah jalan mengatur lalu lintas, atau menangkap seorang pencuri dan membawanya ke kantor polisi dan lain sebagainya.

Gambaran-gambaran itu benar dan tidak salah, akan tetapi menunjukkan suatu pengertian yang amat sederhana, sebab untuk mengetahui sifat polisi yang sebenarnya diperlukan pengertian dan pengenalan akan fungsi dan kewajibanya lebih lanjut.

Kalau kita perhatikan lebih lanjut maka gambaran polisi yang mereka berikan amat tergantung dari pengetahuannya masing-masing yang tidak

---

<sup>1</sup> M.Karjadi, *Polisi*,( Bogor ,Politeia : 1978) h.50

selalu menyenangkan, bahkan tidak sedikit orang menganggap polisi itu sebagai hantu yang harus dijaui. Banyak anggapan seperti itu pun tidak salah, karena apabila diteliti lebih lanjut, sekalipun tidak jelas, akan tetapi yang mereka gambarkan atau rasakan itu ada sesuatu yang mereka takut teristimewa apabila mereka itu merasa mempunyai kesalahan atau berdosa, atau mempunyai niat untuk berbuat sesuatu yang pada hakekatnya dilarang atau tidak sesuai dengan apa yang telah umum. Gambaran atau perasaan seperti inilah yang mereka identikkan dengan polisi dan hal ini memang tidak jauh dari pada kenyataannya, bahkan amat tepat, oleh karena dalam filsafatnya berdasarkan penelitian para ahli hakekat polisi itu adalah “kontrol” yang artinya memang pengawasan dan pengendalian terhadap perilaku yang tidak beres.<sup>2</sup>

Kalau kita kemukakan nama sebuah “Barisan Pengawal” di ibukota Majapahit yang bernama “Bhayangkara” yang identik dengan tugas kepolisian, maka ternyata bahwa Jawa Kuno “Bhayangkara” yang asalnya dari bahasa Sanserta, sesungguhnya berarti juga “menakutkan”.

Mari kita lihat pada diri kita sendiri. Dalam bathin kita sebagai manusia ada sesuatu fungsi rohaniah yang dalam hidup kita sehari-hari bertugas mengawasi dan mengendalikan pribadi kita untuk hidup pada jalan yang lurus untuk mencapai ketertiban dan ketenangan bathin demi hidup sejahtera dan bahagia di dunia ini. Fungsi rohaniah ini kita kenal sebagai: “hati nurani”.

---

<sup>2</sup> *Ibid*, h.51



Demikian pula dalam masyarakat pun harus ada sesuatu yang berfungsi seperti hati nurani itu, ialah sesuatu yang mutlak harus ada untuk dapat dicapai keadaan *tertib*, *aman*, *sejahtera* dan *bahagia* dalam penghidupan bersama. Sesuatu yang mutlak harus ada itu adalah yang disebut “kontrol” tadi, dan kontrol ini adalah polisi, sehingga polisi merupakan “hati nurani” masyarakat atau rakyat.

Pemikiran “hati nurani rakyat” ini menurut penuturan Drs. R. Wahjudi B. Wiriodihardjo dalam kuliahnya yang berjudul “Pengantar Falsafah Kepolisian”, bukanlah pemikiran yang khas Indonesia, akan tetapi pemikiran yang universal, orang Belanda menyebut “gewetan”, orang Inggris “mind” pada penjaga dan pengatur pribadi manusia dan yang bersemayam dalam diri manusia itu.<sup>3</sup>

Tugas sebagai hati nurani rakyat itu kemudian diwujudkan dalam gerakan atau operasi yang biasa disebut “Patroli”. Menurut sejarah tugas itu telah dijalankan, yaitu pada tahun 495 S.M., di mana pada waktu itu orang-orang Romawi mengadakan kelompok orang-orang yang mereka namakan: “aediles”, atau dalam bahasa Inggrisnya: “Patroli-man”.

Di Indonesia sekarang ini kepolisian masih ada pula kelompok orang-orang yang bertugas patrol itu, yang biasa disebut “sabara” atau “patrol jalan raya”. Di desa atau kampung ada “ronda kampung” atau “hansip/ karma kampung”.

---

<sup>3</sup> *Ibid*, h.51

Hati nurani bagi manusia dan kontrol atau polisi bagi masyarakat adalah merupakan suatu fungsi untuk dapat melaksanakan tugasnya harus mempunyai susunan, *tugas-kewajiban*, *wewenang* dan *kekuasaan*. Terang bahwa tugas polisi adalah: “mengawasi masyarakat agar jangan sampai terjadi hal-hal atau ada orang-orang yang mengganggu keteangan dan ketentraman (keseimbangan) yang sedang dinikmati rakyat dalam masyarakat”. Untuk dapat melaksanakan tugas itu polisi memerlukan wewenang dan kekuasaan tertentu sebagai pelengkap, sebab tanpa itu semua polisi tidak berarti apa-apa, bahkan tidak dapat berbuat apa-apa, kecuali mengawasi belaka.

Wewenang itu, sesuai dengan hati nurani, berupa “memperingatkan” yaitu memberikan perhatian dengan jalan “peneguran”. Apabila hal ini tidak dihiraukan atau teguran polisi itu tidak ada hasilnya, maka dapat diadakan penangkapan, penyidikan dan bila diperlukan penahanan, serta dibuatkan Berita Acara guna mengadakan penuntutan pidana di depan pengadilan yang berwajib.

## B. PENGERTIAN ISTILAH

### 1. Motif

Setiap perilaku manusia pada dasarnya mempunyai motif tertentu, termasuk perilaku secara refleks dan berlangsung secara otomatis. Motif merupakan hal yang abstrak yang senantiasa dikaitkan dengan perilaku.<sup>4</sup>

**Motif** merupakan suatu pengertian yang mencakup penggerak, keinginan, rangsangan, hasrat, pembangkit tenaga, alasan dan dorongan, dalam diri manusia yang menyebabkan ia berbuat sesuatu. Secara singkat, dalam diri manusia ada yang mendasari atau yang menentukan perilaku individu yang disebut motif, dengan kata lain motif adalah, energi dasar yang terdapat dalam individu. Motif memberi tujuan dan arah kepada perilaku manusia.

Motif atau *motive* (bahasa Inggris) berasal dari kata *motion* yang berarti gerakan atau sesuatu yang bergerak. Gerakan tersebut dikaitkan dengan sesuatu yang dilakukan manusia, yaitu perbuatan dan perilaku. Beberapa pendapat para pakar dapat ditemukan sebagai berikut:

Menurut *Lindzey, Hall* dan *Thompson* (1975) seperti dikemukakan Abu Ahmadi (1999) “motif adalah segala sesuatu yang menimbulkan perilaku”.

*Abu Ahmadi* (1999) mendefinisikan, “motif adalah sesuatu yang ada dalam diri individu yang menggerakkan atau yang membangkitkan, sehingga individu itu berbuat sesuatu”.

---

<sup>4</sup> Sunaryo, *psikologi untuk keperawatan*, perpustakaan nasional, (Jakarta:Penerbit Buku Kedokteran, 2004).cet.1. h.135

Dari beberapa pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa “motiv adalah sesuatu kekuatan dasar yang terdapat dalam diri organisme yang menyebabkan organisme itu bertindak atau berbuat sesuatu untuk memenuhi adanya kebutuhan agar tercapai keseimbangan (homeostatis)”. Selanjutnya yang dimaksud perilaku bermotiv adalah “perilaku yang dilaksanakan manusia karena adanya kebutuhan yang dirasakan sehingga perilaku itu ditujukan kearah tercapainya suatu tujuan”. Dan juga motiv dapat disimpulkan bahwa Motif merupakan suatu dorongan dan kekuatan yang berasal dari dalam diri seseorang, baik yang disadari maupun tidak disadari untuk mencapai tujuan tertentu.<sup>5</sup>

## 2. Akibat

**Akibat**, hasil, resiko adalah hal atau keadaan yang menjadi kesudahan dari suatu peristiwa, kejadian, atau kegiatan tertentu yang tak terencana atau tak terduga. **Hasil** berarti hal atau keadaan yang baik yang menjadi kesudahan dari suatu peristiwa atau kegiatan yang sesuai dengan harapan yang telah terencana atau terprogram. **Resiko** berarti hal atau keadaan yang buruk yang menjadi kesudahan dari suatu peristiwa atau kegiatan yang tidak sesuai dengan harapan yang telah terencana atau terprogram.<sup>6</sup>

---

<sup>5</sup> *Ibid*, h 136

<sup>6</sup> Peter Salim, & Yenny Salim, *Kamus bahasa Indonesia kontemporer*, (Jakarta: Modern English press, 2002) h.30

Akibat juga merupakan akhir atau hasil suatu peristiwa (pembuatan, keputusan); persyaratan atau keadaan yang mendahuluinya. **Hukum** akibat yang timbul karena peristiwa hukum; **Meng.a.ki.bat.kan** menyebabkan atau menimbulkan peristiwa atau keadaan tertentu; mendatangkan akibat **Aki.bat.nya** akhirnya; hasilnya; kesudahannya; **Ber.a.ki.bat** berkesudahan; berakhir dengan **Ber.a.ki.bat.kan** menjadi akibat.<sup>7</sup>

## C. SEJARAH PERKEMBANGAN KEPOLISIAN

### 1. Kepolisian pada Umumnya

Asal-usul kata polisi itu dari kata Yunani “politeia”. Mula-mula kata politeia dipergunakan untuk menyebut “orang menjadi warga Negara dari kota Athena”, kemudian pengertian itu berkembang dan artinya berubah menjadi “kota” dan dipakai juga untuk menyebut “semua usaha kota”. Oleh Karena pada zaman itu kota-kota merupakan negara-negara kecil sendiri-sendiri, yang juga disebut “polis”, maka politeia atau polisi itu memperoleh arti: “semua usaha dan kegiatan negara (bestuur atau pamongpraja), termasuk juga kegiatan keagamaan”.

Dalam abad-abad pertama sesudah tarikh Masehi agama nasrani mendapat kemajuan dengan pesat dan berkembang luas, sehingga mekin lama urusan dan kegiatan agama menjadi semakin banyak, kemudian merupakan urusan khusus dan perlu diselenggarakan secara khusus pula.

---

<sup>7</sup> *Ibid.*

Oleh karena itu akhirnya urusan agama dikeluarkan dari usaha politeia (polis atau negara-kota).

Pada abad ke 14 dan 15 di Perancis dipakai kata “police” dan di Jerman kata “polizei” dan perkataan-perkataan itu sudah mengeluarkan urusan agama dari usaha “politeia”, sehingga apa yang dinamakan “politeia” atau “polis”, yang kemudian menjadi kata-kata “la police” (Perancis), “politeia” (Itali), “polizei” (Jerman), “police” (Inggris), “politie” (Belanda), “polis di Raja” (Malaysia), dan “polisi” (Indonesia) hanya meliputi usaha dan urusan keduniawian saja.

Kita ketahui dari abad ke abad, bahwa dengan berkembang dan meluasnya urusan negara, untuk efisiensi kerja diperlukan pembagian tugas dan masing-masing tugas diserahkan kepada badan pemerintahan yang khusus. Dengan demikian maka secara berturut-turut dipisahkan dari pengertian “polisi” sebagai usaha negara, pertama-tama urusan luar negeri (diplomasi), kemudian urusan pertahanan (defensi), disusul oleh urusan pengadilan (yustisi) dan akhirnya urusan keuangan (finance), sehingga “polisi” hanya tinggal meliputi bagian urusan negara yang tidak masuk ke dalam empat bagian tersebut di atas yang untuk mudahnya saja dapat disebut dengan bagian “tetek-bengek”. Memang sejak waktu itu (abad 16) pembagian usaha negara di Eropa Barat lazim dilakukan menjadi lima “departemen” sesuai dengan apa yang telah kami sebutkan di atas, yaitu:

1. Departemen Urusan Luar Negeri
2. Departemen Urusan Pertahanan

3. Departemen Urusan Pengadilan
4. Departemen Urusan Keuangan
5. Departemen Urusan Polisi

Departemen Polisi ini menyelenggarakan urusan dalam negeri yang meliputi: administrasi, pemerintahan, pembentuk dan pelaksana semua peraturan yang menonjol keluar sebagai “menuju kepada menjaga ketertiban dan keamanan umum dalam negeri”.

Mulai pada awal abad ke 18 departemen polisi ini meningkatkan usaha negara dalam memajukan kesejahteraan dan kebahagiaan penduduk, sehingga negara dalam hal ini mencampuri urusan rakyatnya dalam penyelenggaraan kesejahteraan dengan peraturan-peraturan dan sarana-sarana yang ada padanya, jika perlu dengan paksaan-paksaan yang akibatnya rakyat tidak bebas lagi dalam geraknya. Dengan turut campurnya pemerintah dalam segala urusan rakyatnya, baik yang bersifat umum, maupun yang bersifat pribumi, maka rakyat menderita tindakan pemerintah yang sewenang-wenang, sehingga mereka merasa tidak mempunyai kebebasan sama sekali.

Negara dengan departemen polisi semacam ini disebut “negara polisi”. Sebagai reaksi terhadap negara polisi ini muncul “negara hukum” mulai pada akhir abad 18 yang membebaskan rakyatnya dari campur tangan negara dengan segala kegiatan mereka. Negara hanya bertindak dalam batas-batas tertentu saja, dan dalam hal inipun negara dibatasi oleh undang-undang, artinya negara hanya boleh bertindak apabila tindakan itu dengan nyata

disebutkan dalam undang-undang. Di luar undang-undang, negara bersikap pasif dan dalam menyelenggarakan kesejahteraan dan kebahagiaan pribadinya rakyat bebas untuk bertindak sendiri.

Kewajiban negara hanya terbatas pada penjagaan ketertiban dan keamanan umum saja, hanya bertindak apabila ada serangan atau gangguan terhadap hak-hak pribadi rakyatnya yang secara harafiah ditentukan di dalam undang-undang.

Undang-undang dipandang sebagai satu-satunya dasar bagi negara untuk bertindak dan tidak ada hukum lain di luar undang-undang. Pandangan ini timbul boleh dikatakan karena kejengkelan rakyat terhadap pengalaman-pengalamannya di dalam negara polisi dahulu, di mana tindakan-tindakan penguasa, oleh karena tidak ditetapkan dalam undang-undang dapat dilakukan dengan sewenang-wenang.

Dalam negara hukum pertama yang bercorak seperti ini rakyatnya menuntut agar hukum yang mendasari segala tindakan penguasa harus dengan seksama ditulis dalam undang-undang dan dibukukan dalam undang-undang.

Pada akhir pada 19 di mana-mana timbul kesadaran masyarakat bahwa untuk memajukan perkembangan bangsa dalam kebudayaan kesenian dan ilmu pengetahuan, meninggikan taraf hidup, kemakmuran dan kesejahteraan, baik jasmaniah maupun rohaniah, perlu sekali bahwa negara harus aktif memelopori dan mendorong rakyat berusaha sekuat-kuatnya. Pada waktu itu timbul pendapat baru, bahwa untuk memajukan kesejahteraan dan



kebahagiaan rakyat penguasa negara tidak terikat hanya pada apa yang ditetapkan dalam undang-undang, akan tetapi demi untuk kepentingan rakyatnya dapat mengambil kebijaksanaan berdasarkan hukum yang hidup dan tidak tertulis.

Sesuai dengan pendapat ini timbullah dari negara hukum yang lama menjadi negara hukum baru, dan sifat serta tugas polisi menyesuaikan dengan perkembangan sifat negara itu. Dalam susunan organisasi negara di manakah letak jawatan kepolisian itu?

1. Departemen Urusan Luar Negeri
2. Departemen Urusan Keuangan
3. Departemen Urusan Pengadilan dan
4. Departemen Urusan Pertahanan

Akan tetapi termasuk dalam Departemen Urusan Polisi sendiri yang hampir identik dengan Departemen Pamongpraja atau Departemen Dalam Negeri. Marilah kita telah bagaimana kedudukan kepolisian di Indonesia? Di zaman Indonesia Kuno maka Kepolisian di negara Kesatuan Majapahit (Tahun 1300 – 1364) dinamakan “Barisan Pengawal Bhayangkara” dipegang oleh Gajahmada, Patih Mangkubumi (*Perdana Menteri*) Majapahit.

Di zaman penjajahan Belanda dimulai dari zaman Gubernur Jendral Raffles sampai Indonesia merdeka (1814-1945) Jawatan Kepolisian Negara diletakkan administratif di bawah Departemen dalam Negeri, sedangkan taktis di bawah Jaksa Agung (Departemen Kehakiman).

Di masa pendudukan Jepang (1942-1945) Kepolisian merupakan jawatan berdiri sendiri dengan nama “Jawa Keisatse Bu” (Kepolisian Jawa) di bawah pemerintah “Gunsei Kan Bu” (Pemerintah balatentara), kemudian pada waktu Jepang hampir kalah perang, dalam tahun 1944, Kepolisian diletakkan administratif di dalam “Cian Bu” (Departemen Keamanan), di bawah “Gunsei Kan Bu” (Pemerintah Balatentara).

Di zaman Republik Indonesia: mulai 17 Agustus 1945 Kepolisian Negara RI diletakkan administratif di bawah Kementerian Dalam Negeri dan operatif di bawah Jaksa Agung (Kementrian Kehakiman).

Kemudian dengan surat keputusan Presiden tanggal 13 Juli 1959 Kepala Kepolisian Negara diangkat menjadi Menteri Kepolisian Negara dan menjadi Anggota Kabinet. Hal ini berarti bahwa sejak 13 Juli 1959 itu Departemen Kepolisian negara tidak membawahi lagi pada perdana Menteri, akan tetapi pada kementerian Keamanan Nasional, di mana termasuk pula Angkatan Darat, Angkatan Laut dan Angkatan Udara.

Apabila ini kita bandingkan dengan proses perkembangan letak Kepolisian pada umumnya seperti telah kami uraikan di atas, maka nyata benar perbedaannya, yaitu kalau menurut perkembangan sejarah umum maka Kepolisian tidak termasuk ke dalam Departemen Pertahanan, tetapi merupakan Departemen sendiri, sedangkan di Indonesia Polri termasuk ke dalam Departemen Pertahanan dan Keamanan Nasional.

Dalam ilmu filsafat kita dapati suatu dasar yang mengatakan bahwanya sesuatu yang ada atau yang dijadikan itu tentu ada yang menyebabkan. Demikian pula Polisi itu ada, karena ada yang menyebabkan.

Dalam uraian yang telah dibentangkan di atas ternyata benar bahwa asal-usul polisi itu pada hakekatnya adalah masyarakat itu sendiri, dari hati nurani (dalam manusia), ayah-ibu (dalam rumah tangga), ninik-mamak, kamitua dan lain sebagainya (dalam suku bangsa), sehingga polisi (dalam suatu negara).

Bukankah adanya suatu hati nurani (kontrol) dalam tubuh manusia itu mutlak untuk keseimbangan pribadinya? Nah demikianlah pula bahwa polisi (kontrol) dalam masyarakat (negara) itu juga mutlak adanya untuk keseimbangan masyarakat (negara) tersebut.

## **2. Kepolisian Republik Indonesia**

Apabila dalam manusia ada “hati nurani”, maka dalam rumah tangga dan selanjutnya dalam masyarakat dan negara pasti ada pula fungsi pengawasan dan pengendalian “pengontrol” yang seperti hati nurani itu mengawasi dan mengendalikan tata-tertib dan keamanan masyarakat dalam mengadakan kehidupan bersama yang sejahtera dan bahagia. Fungsi pengontrol tersebut pada hakekatnya adalah polisi yang fungsinya telah bisa kita kenal sebagai : “menjaga ketertiban dan keamanan umum” dalam suatu negara.

Tentang kepolisian di Indonesia Kuno kita tidak tahu dengan sebenarnya, oleh karena tidak ada bukti-bukti yang jelas yang sampai ke tangan kita. Andaikata di Indonesia Kuno ada kepolisian, tentu saja bentuk, susunan dan hukumnya berlainan sekali dengan kepolisian zaman sekarang. Berdasarkan pikiran yang telah kita uraikan di atas secara logika dapat dipastikan bahwa di Indonesia Kuno ada juga suatu badan atau kekuasaan yang tugasnya menjaga ketertiban dan keamanan negara.

Dalam hal ini baiklah kita kemukakan nama sebuah “Barisan Pengawal” di ibukota Majapahit yang bernama “Bhayangkara”. Kata Jawa Kuno “bhayangkara” yang asalnya dari bahasa Sanskerta, sesungguhnya berarti: “menakutkan”. Berkenaan dengan arti kata itu, boleh kita katakan arti secara kuno, bahwa nama Barisan Pengawal yang menjaga keamanan. Adapun riwayat Bhayangkara (polisi) dapat kita jumpai dalam buku kuno “Pararaton”, yang bersangkutan paut dengan riwayat “Gajahmada”, Patih Mangkubumi di Majapahit, seorang ahli negara ulung, yang namanya berhubungan erat dengan Kesatuan Indonesia (1300-1364).

Gajahmada kira-kira dilahirkan dalam tahun 1300. Lebih dari 40 tahun ia berjuang untuk kesatuan dan kepentingan negara. Pernah ia sebagai “Bekel” (Komandan) Barisan Pengawal Bhayangkara membela jiwa kepala negara, Sri Jayanegara dari Majapahit dalam pemberontakan yang dilakukan oleh Kuti.

Pada akhirnya Gajahmada diangkat menjadi Maha Patih Mangkubumi yang riwayatnya merupakan sejarah negara Majapahit. Majapahit

bertumbuh, membubung tinggi dan mengalami kemuliaan bersama-sama dengan hasil politik Gajahmada.

Setelah ia meninggal dunia, maka Majapahit yang diperintah oleh raja Hayamwuruk mendapat kekuasaan yang besar di lingkungan daerah Asia Tenggara, akan tetapi orang tidak tahu di mana abu Gajahmada tersimpan dalam pangkuan Ibu Pertiwi.

Sesudah zaman Majapahit dan sebelum datangnya penjajah Belanda, Indonesia dikuasai oleh Raja-raja Indonesia, yang sudah barang tentu mempunyai barisan-barisan pengawal seperti Bhayangkara yang mempunyai macam-macam nama sendiri-sendiri yang berfungsi sebagai polisi.

Di Jawa misalnya, khususnya di Jawa Tengah, kita jumpai misalnya nama-nama seperti: Bupati, Kliwon, Wedana, Penewu, Penatus, Lurah, Jogoboyo, Kepetengan, Tamping, Kebayan, Jogotirto, dan lain sebagainya yang untuk raja dan kerajaan bertugas sebagai pemegang kekuasaan, penjaga ketertiban dan keamanan umum kerajaan dari kota-kota kerajaan sampai di pelosok-pelosok daerah, yang antara lain berfungsi sebagai polisi. Sampai pada zaman sekarang inipun nama-nama fungsionaris seperti itu masih ada peninggalannya seperti: Bupati, Patih, Wedana, Camat, Lurah dan sebagainya yang menjalankan tugas kepolisian, akan tetapi rupa-rupanya suatu barisan yang merupakan kesatuan kepolisian serupa yang kita jumpai pada zaman sekarang, dulu belum ada.

Sekianlah kiranya yang dapat kami jawab tentang pertanyaan: adakah dalam sejarah kuno Indonesia kepolisian itu? Sebenarnya kita ingin

mengetahui lebih dalam lagi tentang seluk beluk kehidupan kepolisian di zaman itu, akan tetapi hal itu tidak dapat kita ketahui karena tidak ada sumber-sumber perpustakaan yang dapat memberikan data-data yang diperlukan.

Dapat ditambahkan di sini, bahwa menurut sumber yang terdapat dalam buku karangan Mohamad Yamin yang berjudul “Gajahmada” diterangkan bahwa Barisan Pengawal Bhayangkara (dalam buku itu disebut “jawatan Bhayangkara”) anggotanya semua terdiri dari satria muda, yang bersifat berani dan bersih, serta mau mengatasi segala kesukaran dan bahaya maut. Jawatan Bhayangkara terdiri dari dua bagian, yaitu Bhayangkara pusat yang berkewajiban menjaga keselamatan mahkota, dan Bhayangkara lelana (daerah) yang kewajibannya sebagai pelopor menjaga ketetapan cita-cita negara.

#### **D. TUGAS-TUGAS KEPOLISIAN**

##### **1. Apakah Keamanan Itu?**

Filsafat agama mengatakan, bahwa manusia itu diciptakan oleh Tuhan dalam keadaan sempurna, oleh karena segala ciptaan Tuhan itu sempurna. Segala sesuatu, juga manusia, yang berada di alam semesta itu adanya tunduk pada kesatuan-kesatuan hukum tertentu, yang disebut “hukum alam”.<sup>8</sup>

---

<sup>8</sup> *Ibid*, h. 61

Rupa-rupanya hukum alam ini, kapan saja dan di mana pun juga, menghendaki adanya “keseimbangan”. Sudah menurut hukum alam atau kodratnya juga, bahwa apabila terjadi sesuatu yang menyebabkan kegoncangan atau berubahnya keseimbangan, maka sudah pasti ada sesuatu yang lain terjadi yang akan mengembalikan kegoncangan itu menjadi seimbang kembali seperti semula. Apakah artinya “keseimbangan” itu? Yang dinamakan keseimbangan ialah suatu keadaan di mana segala sesuatu dalam keadaan normal atau dalam keadaan “running well”, artinya segala sesuatu berjalan baik menurut nalurnya masing-masing.

Keadaan yang demikian itu kita sebut pula keadaan yang damai, tenang, tenteram dan aman. Keadaan-keadaan itu merupakan suatu suasana yang meliputi seorang atau masyarakat demikian rupa sehingga orang atau masyarakat itu hidup dengan keadaan damai, tenang, tenteram dan aman, sehingga merasa sejahtera dan bahagia, baik jasmaniah maupun rohani.

Goncangan-goncangan yang disebabkan oleh ancaman-ancaman, hambatan-hambatan, rintangan-rintangan, tantangan-tantangan, gangguan-gangguan dan lain sebagainya, dan terjadi itu dapat disebabkan karena keadaan-keadaan dalam alam atau dalam manusia itu sendiri, satu sama lain saling pengaruh mempengaruhi.

Manusia sebagai ciptaan Tuhan itu merupakan “jagat kecil” (mikro kosmos), kebalikan dari alam semesta yang kita namakan “jagat raya” (makro kosmos). Sebagai mikro kosmos manusia mempunyai tubuh kasar dan tubuh halus atau jasmani dan rohani.

Baik jasmaniah maupun rohaniah dalam keadaan normal manusia itu dalam keadaan seimbang, yaitu tenang, aman dan damai, tidak ada pikiran apa-apa “sirna-galih” (Sunda).

Keamanan berasal dari kata “aman yang terdiri dari kata “a” dan “man”, “a” berarti tidak, tidak ada atau jalan, “man” adalah singkatan dari kata “manas” = manah (Jawa), mind (Inggris) atau geest (Belanda). Jadi aman itu berarti: “tidak mempunyai pikiran waswas”.

Pikiran waswas itu dikarenakan ada hal-hal yang mengganggu panca-indera, sehingga pikiran menjadi kacau, oleh karena pikiran itu dalam “keadaan yang tidak menentu atau serba tak ada keputusan”.

Keamanan atau aman adalah suatu kondisi dimana seseorang atau suatu kelompok mempunyai rasa, bahwa dirinya berpikir dengan pasti, tidak mempunyai rasa khawatir terhadap apapun karena bebas dari ancaman bahaya. Orang itu merasa tenang dan aman sehingga dapat menjalankan usahanya sehari-hari. Oleh karena usahanya itu berhasil, maka ia merasa senang dan bahagia.

Keadaan aman itu keadaan kodrati manusia dan oleh Perserikatan Bangsa-bangsa diakui sebagai “four freedom” (empat kebebasan) yaitu:

“freedom from fear” (bebas rasa takut)

“freedom of thought” (bebas mengeluarkan pikiran)

“freedom from want” (bebas berkehendak)

“freedom of religion” (bebas memeluk agama)



Aman baik jasmaniah maupun rohaiah menurut faham Indonesia adalah sebagaimana keadaan yang digambarkan oleh ki Dalang dalam pewayangan:

“Tata Tentrem Karta Raharja”.

Tata artinya: segala sesuatu serba teratur dan tertib.

Tentrem artinya: sibuk, ramai dengan pekerjaan.

Raharja artinya: bahagia, sejahtera.

Dengan demikian maka “suluk” ki Dalang yang berbunyi: “Tata Tentrem Karta Raharja” menggambarkan pula proses tercapainya suatu kebahagiaan hidup di dunia ini, yaitu apabila orang menghendaki suatu kehidupan yang sejahtera dan bahagia, maka pertama-tama harus diciptakan keadaan yang tertib, artinya segala sesuatu, baik jasmaniah maupun rohaniah, harus serba teratur. Sesudah itu barulah dapat dicapai keadaan yang “tentrem”, artinya aman dan tenteram. Setelah tercapai keadaan aman dan tenteram, barulah orang dapat menjalankan karyanya sehari-hari (karta) yang akhirnya akan memperoleh kesejahteraan dan kebahagiaan dalam hidup (raharja).

## **2. Tujuan**

Segala sesuatu yang ada itu selalu ada yang mengadakan. Dari kenyataan pengalaman hidup kita sehari-hari dapat diketahui juga, bahwa yang ada itu akhirnya akan tidak ada. Ketidak adanya itu disebabkan karena telah tercapainya sesuatu yang menjadi tujuannya, selesai apa yang dituju. Misalnya: pasar malam itu ada. Tentu ada yang mengadakan, yaitu: panitia

pengumpulan dana bencana alam. Selang beberapa waktu pasar malam itu sudah tidak ada lagi, sudah bubar karena tujuannya telah tercapai yaitu: sejumlah uang pendapatan sebagai dana yang dituju telah terkumpul. Ketidak adanya pasar malam itu karena telah tercapainya tujuan.

Jadi dapat kita katakan bahwa segala sesuatu yang ada di dunia ini selalu mempunyai *tujuan*. Bagi yang berkepentingan tujuan itu ada artinya, tegasnya mempunyai nilai.

Tujuan itu dapat dibedakan antara tujuan antara dan tujuan akhir, dan tujuan akhirlah yang terpenting.

Penting, tidak penting atau terpenting itu pada hakekatnya tergantung pada penilaiannya. Timbul pertanyaan: dalam kehidupan manusia itu manakah yang terpenting? Apakah tujuannya itu telah tercapai, lalu selesaikah sudah semua, puaskah?

Dalam pengalaman hidup kita sehari-hari terang bahwa hal itu tidak demikianlah adanya. Tercapainya suatu tujuan itu belum tentu merupakan kepuasan pada umumnya. Malahan kerap kali kita masih merasa kecewa dan kekecewaan itu sering kita dengar dari ucapan: “sudah selesai ini, hanya beginikah hasilnya?”

Dalam hal ini ternyata yang terpenting itu bukanlah tercapainya suatu tujuan, misalnya gelar atau piala yang setelah selesai hanya disimpan saja dalam lemari, tetapi yang penting adalah rasa ketegangan yang dialaminya waktu mengerahkan segala kekuatan untuk mencapainya tujuan. Di sini

yang penting adalah permainannya “spel” (Belanda) atau “game” (Inggris) dan bukan hasilnya.

Ada pendapat: tidak perlu memikirkan bagaimana cara mainnya, yang terpenting kita memperoleh hasilnya. Di samping itu ada pula pendapat: tidak perlu mencatat kemenangan, yang penting harus baik dan sportif permainan bolanya. Persoalannya di sini sebetulnya bukan persaingan antara kemenangan dan permainan baik, tetapi yang menjadi pokok permainan dan pekerjaan itu harus dilakukan dengan moral yang baik. Moral ini sifatnya pribadi, akan tetapi di samping itu kita hidup dalam masyarakat dan masyarakat itu mempunyai penilaian sendiri terhadap kita.

Sudah barang tentu yang paling baik adalah bahwa di dalam suatu permainan (pekerjaan) proses itu orang bermain baik, artinya mengindahkan segala peraturan permainan disamping ia memperoleh kemenangan serta berhasil. Dalam penghidupan sehari-hari ternyata orang kerap kali lupa tentang hal itu. Ini layak kiranya, bahwa manusia bersifat pelupa.

Dalam prakteknya tujuan itu kerap kali hanya jadi tujuan saja. Dalam kehidupan sehari-hari sering terjadi penugasan atau tugas itu oleh petugas diselesaikan dengan “asal” saja tidak dipikirkan apakah pelaksanaan itu baik atau tidak.

Dalam uraian di atas sambil lalu telah kita ketahui, bahwa tujuan terakhir polisi adalah “keamanan”. Telah kita ketahui pula apa yang dimaksud dengan keamanan itu. Keamanan itu merupakan suatu “suasana”, suasana aman yang ditimbulkan oleh manusia-manusia yang hidup bersama

dalam masyarakat itu. Dengan demikian objek tujuan akhir polisi adalah “perasaan manusia”. Perasaan ini harus dipengaruhi demikian, sehingga merasa aman.

Adapun proses mempengaruhinya itu tidak langsung dengan sekaligus, karena sebagaimana telah kita ketahui tujuan polisi itu terdiri atas tujuan antara dan tujuan akhir.

Sebelum tujuan akhir itu bisa tercapai, tujuan antaranya harus dicapai terlebih dahulu. Mula-mula kita ciptakan dahulu suatu keadaan yang “tata” (tertib). Setelah keadaan menjadi “tata” (tertib), barulah dapat diciptakan suasana “teentrem” (tentram). Dalam keadaan “tentrem” suasana menjadi “kerta” (ramai bekerja), setelah itu barulah merasa “raharja” (sejahtera dan bahagia) dan dengan demikian tercapailah tujuan terakhir polisi, yaitu “keamanan”.

#### **E. KEMANDIRIAN POLRI**

Kemandirian Polri diawali sejak terpisahnya dari ABRI tanggal 1 April 1999 sebagai bagian dari proses reformasi haruslah dipandang dan disikapi secara arif sebagai tahapan untuk mewujudkan Polri sebagai abdi negara yang profesional dan dekat dengan masyarakat, menuju perubahan tata kehidupan nasional kearah masyarakat madani yang demokratis, aman, tertib, adil dan sejahtera. Kemandirian Polri dimaksud bukanlah untuk menjadikan institusi yang tertutup dan berjalan serta bekerja sendiri, namun

tetap dalam kerangka ketata negaraan dan pemerintahan negara kesatuan Republik Indonesia yang utuh termasuk dalam mengantisipasi otonomi daerah sesuai dengan Undang-undang No.22 tahun 1999 tentang Otonomi Daerah dan Undang-undang No.25 tahun 1999 tentang Perimbangan keuangan antara pusat dan daerah. Pengembangan kemampuan dan kekuatan serta penggunaan kekuatan Polri dikelola sedemikian rupa agar dapat mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Polri sebagai pengemban fungsi keamanan dalam negeri. Tugas dan tanggung jawab tersebut adalah memberikan rasa aman kepada negara, masyarakat, harta benda dari tindakan kriminalitas dan bencana alam. Upaya melaksanakan kemandirian Polri dengan mengadakan perubahan-perubahan melalui tiga aspek yaitu:

- Aspek Struktural: Mencakup perubahan kelembagaan Kepolisian dalam Ketata negaraan, organisasi, susunan dan kedudukan.
- Aspek Instrumental: Mencakup filosofi (Visi, Misi dan tujuan), Doktrin, kewenangan, kompetensi, kemampuan fungsi dan Iptek.
- Aspek kultural: Adalah muara dari perubahan aspek struktural dan instrumental, karena semua harus terwujud dalam bentuk kualitas pelayanan Polri kepada masyarakat, perubahan meliputi perubahan manajerial, sistem rekrutmen, sistem pendidikan, sistem material fasilitas dan jasa, sistem anggaran, sistem operasional.

Berkenaan dengan uraian tugas tersebut, maka Polri akan terus melakukan perubahan dan penataan baik di bidang pembinaan mau pun operasional serta pembangunan kekuatan sejalan dengan upaya Reformasi.

## 1. Visi dan Misi

**Visi Polri :** Polri yang mampu menjadi pelindung Pengayom dan Pelayan Masyarakat yang selalu dekat dan bersama-sama masyarakat, serta sebagai penegak hukum yang profesional dan proposional yang selalu menjunjung tinggi supremasi hukum dan hak azasi manusia, Pemelihara keamanan dan ketertiban serta mewujudkan keamanan dalam negeri dalam suatu kehidupan nasional yang demokratis dan masyarakat yang sejahtera.

**Misi Polri :** Berdasarkan uraian Visi sebagaimana tersebut di atas, selanjutnya uraian tentang jabaran Misi Polri kedepan adalah sebagai berikut:

- Memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat (meliputi aspek security, surety, safety dan peace) sehingga masyarakat bebas dari gangguan fisik maupun psikis.
- Memberikan bimbingan kepada masyarakat melalui upaya persuasif dan preventif yang dapat meningkatkan kesadaran dan kekuatan serta kepatuhan hukum masyarakat (Law abiding Citizenship).
- Menegakkan hukum secara profesional dan proporsional dengan menjunjung tinggi supremasi hukum dan hak azasi manusia menuju kepada adanya kepastian hukum dan rasa keadilan.

- Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat dengan tetap memperhatikan norma-norma dan nilai-nilai yang berlaku dalam bingkai integritas wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- Mengelola sumber daya manusia Polri secara profesional dalam mencapai tujuan Polri yaitu terwujudnya keamanan dalam negeri sehingga dapat mendorong meningkatnya gairah kerja guna mencapai kesejahteraan masyarakat
- Meningkatkan upaya konsolidasi kedalam (internal Polri) sebagai upaya menyamakan Visi dan Misi Polri kedepan.
- Memelihara soliditas institusi Polri dari berbagai pengaruh external yang sangat merugikan organisasi.
- Melanjutkan operasi pemulihan keamanan di beberapa wilayah konflik guna menjamin keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- Meningkatkan kesadaran hukum dan kesadaran berbangsa dari masyarakat yang berbhineka tunggal ika.

Sasaran : Dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi Polri pada kurun waktu tahun 2000 - 2004 yang akan datang ditetapkan sasaran yang hendak dicapai adalah : Bidang Kamtibmas

- Tercapainya situasi Kamtibmas yang kondusif bagi penyelenggaraan pembangunan nasional.
- Terciptanya suatu proses penegakan hukum yang konsisten dan berkeadilan, bebas KKN dan menjunjung tinggi hak azasi manusia.

- Terwujudnya aparat penegak hukum yang memiliki integritas dan kemampuan profesional yang tinggi serta mampu bertindak tegas adil dan berwibawa.
- Kesadaran hukum dan kepatuhan hukum masyarakat yang meningkat yang terwujud dalam bentuk partisipasi aktif dan dinamis masyarakat terhadap upaya Binkamtibmas yang semakin tinggi.
- Kinerja Polri yang lebih profesional dan proporsional dengan menjunjung tinggi nilai-nilai demokrasi sehingga disegani dan mendapat dukungan kuat dari masyarakat untuk mewujudkan lingkungan kehidupan yang lebih aman dan tertib.

#### Bidang Keamanan Dalam Negeri

- Tercapainya kerukunan antar umat beragama dalam kerangka interaksi sosial yang intensif serta tumbuhnya kesadaran berbangsa guna menjamin keutuhan bangsa yang ber Bhineka Tunggal Ika.
- Tetap tegaknya Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.

Filosofi: Disimak dari kandungan nilai Pancasila dan Tribrata secara filosofi memuat nilai-nilai kepolisian sebagai abdi utama, sebagai warga negara teladan dan wajib menjaga ketertiban pribadi rakyat.

## 2. Polsek Kuantan Mudik

Polsek Kuantan Mudik berdiri pada tahun 1959, pada mulanya Polsek kuantan mudik adalah pos polisi, namun karena perkembangan daerah dan



bentuk – bentuk kejahatan yang mulai meningkat, maka dibutuhkanlah pembentukan Polsek baru demi tercapainya kamtibmas (keamanan, ketertiban masyarakat), Polsek yang baru dibentuk biasanya disebut “Polsek persiapan”, yang beralamat di jalan Sudirman Kecamatan Kuantan mudik Kabupaten Kuantan Singingi, berikut daftar nama Kepala Polisi Sektor yang pernah menjabat di Kepolisian Sektor Kuantan Mudik:

**Tabel 1 Daftar Nama Kepala Kepolisian Sektor Kuantan Mudik  
Periode 1959 – Sekarang**

<b>No</b>	<b>Nama/ Pangkat</b>	<b>Pangkat</b>	<b>Periode Jabatan</b>	<b>Keterangan</b>
1	Latif	Pelda	1959 – 1962	-
2	Kalam	Pelda	1962 – 1965	-
3	Nasrun	Peltu	1965 – 1967	-
4	M. Disin	Pelda	1967 – 1969	-
5	Ali Sulaiman		1969 – 1971	-
6	Ali Amsanmuna		1971 – 1974	-
7	Soecdi	Pelda	1974 – 1977	-
8	Agoes Salim	Pelda	1977 – 1978	Kaposek
9	Solechan	Lettu Pol	1978 – 1983	Dansek
10	Ibrahim Zakaria	Pelda	1983 -1985	Kapolsek
11	Wahyu Hadi	Lettu Pol	1985 – 1987	Kapolsek
12	Achmat R	Lettu Pol	1987 – 1988	Kapolsek
13	Anang Suhardi	Lettu Pol	1988 – 1990	Kapolsek
14	Tarya Santika	Lettu Pol	1990 – 1992	Kapolsek
15	M. Hutagalung SMHK	Lettu Pol	1992 - 1995	Kapolsek
16	Isralba	Lettu Pol	1995 – 1997	Kapolsek
17	Iskandar	Lettu Pol	1997 – 1999	Kapolsek
18	Bahrin	Lettu Pol	1999 – 2001	Kapolsek
19	Rizal Usman	Iptu	2001 – 2002	Kapolsek
20	Joni Wardi	Ipda	19-04-2002 – 30-12-2002	Kapolsek
21	Januardi SH	Iptu	30-12-2002 – 19-02-2003	Kapolsek
22	Efrizon Caniago	Iptu	19-02-2003 – 21-01-2004	Kapolsek
23	Suprpto	AKP	21-01-2004 – 03-12-2005	Kapolsek
24	Syofian	AKP	03-12-2005 – 04-02-2008	Kapolsek
25	Supriyono	AKP	04-02-2008 – 16-01-2010	Kapolsek
26	Syafri Joni SE	AKP	16-01-2010 – 12-07-2010	Kapolsek
27	Ben Hardi SH	AKP	12-07-2010 – Sekarang	Kapolsek

Sumber : Kepolisian Sektor Kuantan mudik, 2010

Polsek kuantan mudik didukung dengan personil yang berjumlah 23 orang, dan didukung dengan kendaraan dinas, berupa 2 (dua) unit mobil patroli, 4 (empat) unit sepeda motor, dan 5 (lima) unit sepeda listrik. Berikut nama – nama personil Polsek Kuantan Mudik :

**Tabel 2     Daftar Nama Personil Kepolisian Sektor Kuantan Mudik  
Tahun 2010**

<b>NO</b>	<b>NAMA</b>	<b>PANGKAT/ NRP</b>
1	BEN HARDI	AKP / 65100128
2	YUSMARDION	AIPTU / 6302427
3	BJ. KERAMIS	AIPDA / 69090124
4	SURATMAN, MS	BRIPKA / 62030677
5	ASMARDI	BRIPKA / 61070210
6	AGUS SALIM	BRIPKA / 62020667
7	EFRIZAL	BRIPKA / 70080346
8	HENDRI	BRIPKA / 75100586
9	INDRA WIJAYA	BRIPKA / 79050009
10	SYAFRIAL	BRIGADIR / 58030212
11	MUKHLASIN	BRIGADIR / 57100239
12	SUARDI SINI	BRIGADIR / 59080609
13	UMAR USMAN	BRIGADIR / 60040436
14	RONI PASLA	BRIPTU / 82080961
15	F. TAMPUBOLON	BRIPTU / 83080999
16	ANTON PURNAWAN	BRIPTU / 84030502
17	MARIO SUWITO	BRIPTU / 85030101
18	SYAMSUDDIN	BRIPTU / 65080012
19	DOLIMAN HS BAEHA	BRIPTU / 85041046
20	RIKI FRANSISKO	BRIPDA / 85111701
21	FAUZI GUNAWAN	BRIPDA / 88030423
22	ARDIANSYAH. P	BRIPDA / 88030383
23	EKO MARDIUS, AP	PHL

Sumber               :   Kepolisian Sektor Kuantan Mudik

### 3. LOGO DAN PENJELASAN

Gambar 1 Logo Kepolisian Negara Republik Indonesia



#### **Catur Prasetya**

Sebagai Insan Bhayangkara, Kehormatan Saya Adalah  
Berkorban Demi Masyarakat, Bangsa Dan Negara, Untuk :

1. Meniadakan Segala Bentuk Gangguan Keamanan
2. Menjaga Keselamatan Jiwa Raga, Harta Benda dan Hak Asasi Manusia
3. Menjamin Kepastian Berdasarkan Hukum
4. Memelihara Perasaan Tenang dan Damai

#### **Tribrata**

Kami Polisi Indonesia

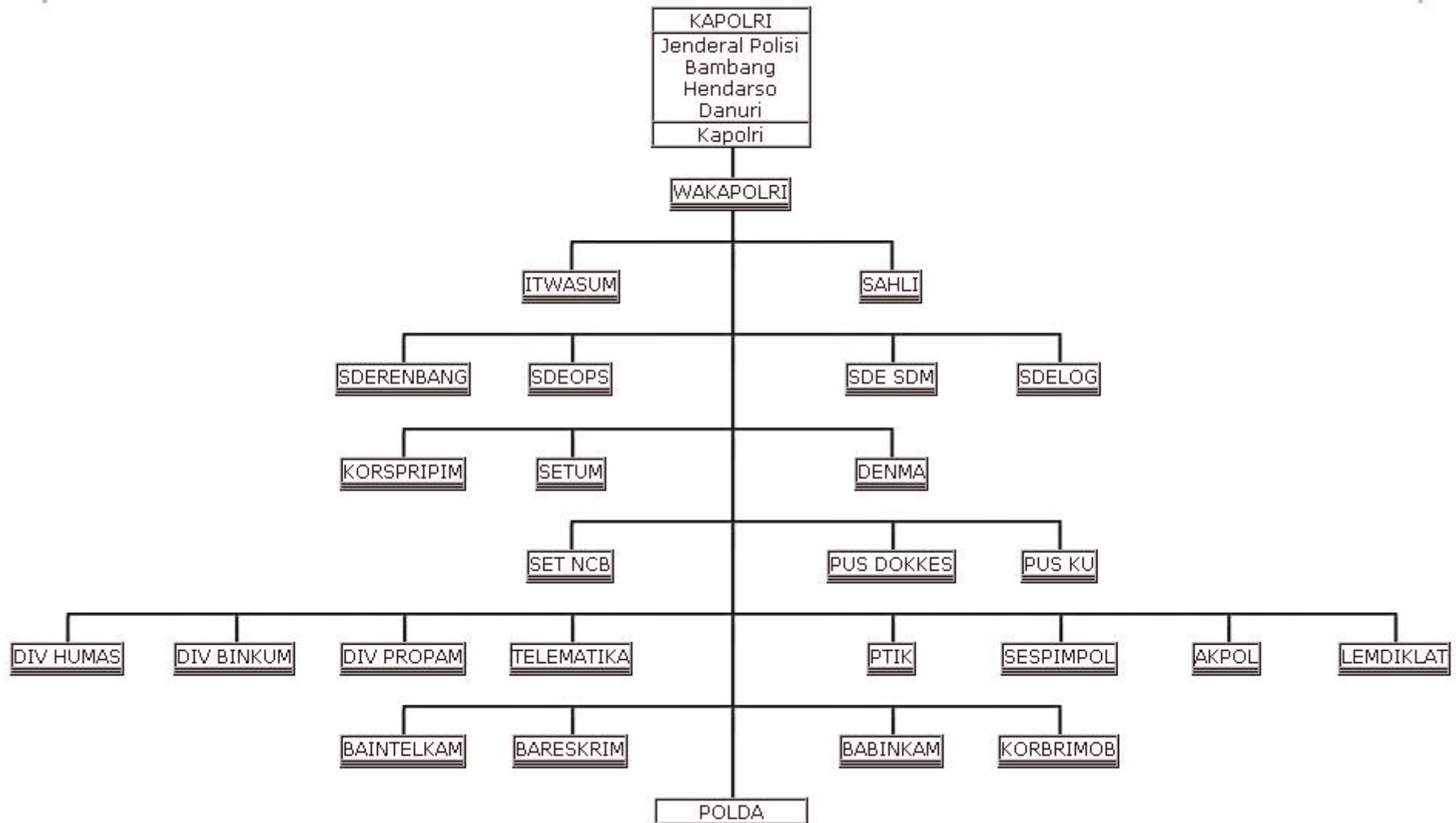
Berbakti pada nusa dan bangsa dengan penuh  
ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa

Menjunjung tinggi kebenaran, keadilan dan  
kemanusiaan dalam menegakkan hukum negara  
Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan  
Pancasila dan Undang Undang Dasar 1945

Senantiasa Melindungi, Mengayomi dan Melayani  
Masyarakat dengan keikhlasan untuk mewujudkan  
keamanan dan ketertiban.

Sumber : Kepolisian Negara Republik Indonesia, 2007

Gambar 2 Struktur Organisasi Kepolisian Negara Republik Indonesia Tahun 2007

**STRUKTUR ORGANISASI POLRI**

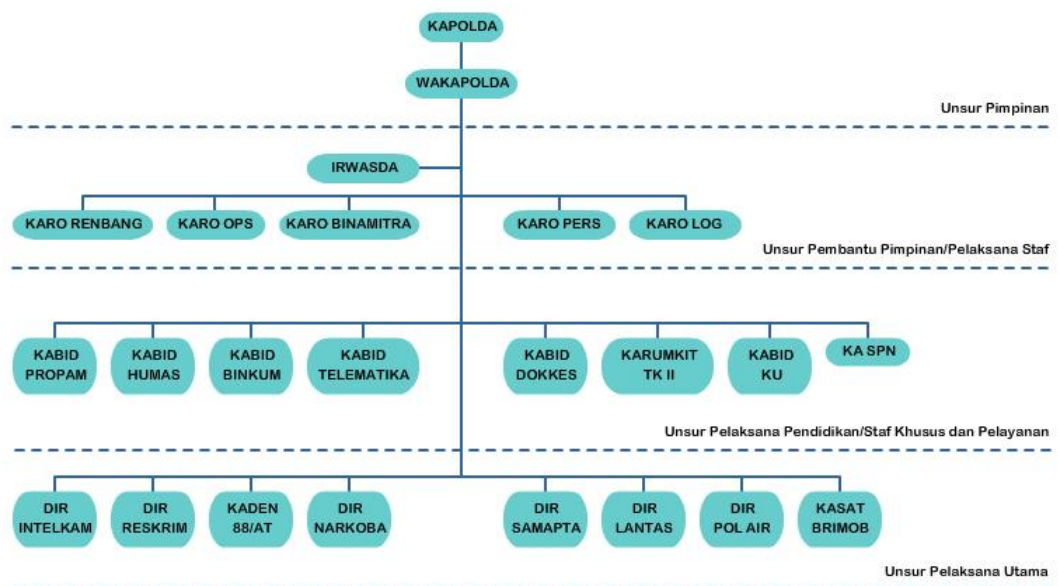
Sumber : Kepolisian Negara Republik Indonesia, 2007

Gambar 3 Peta Kepolisian Negara Republik Indonesia Tahun 2007



Sumber : Kepolisian Negara Republik Indonesia, 2007

Gambar 4 Struktur Organisasi Kepolisian Daerah Riau Tahun 2007



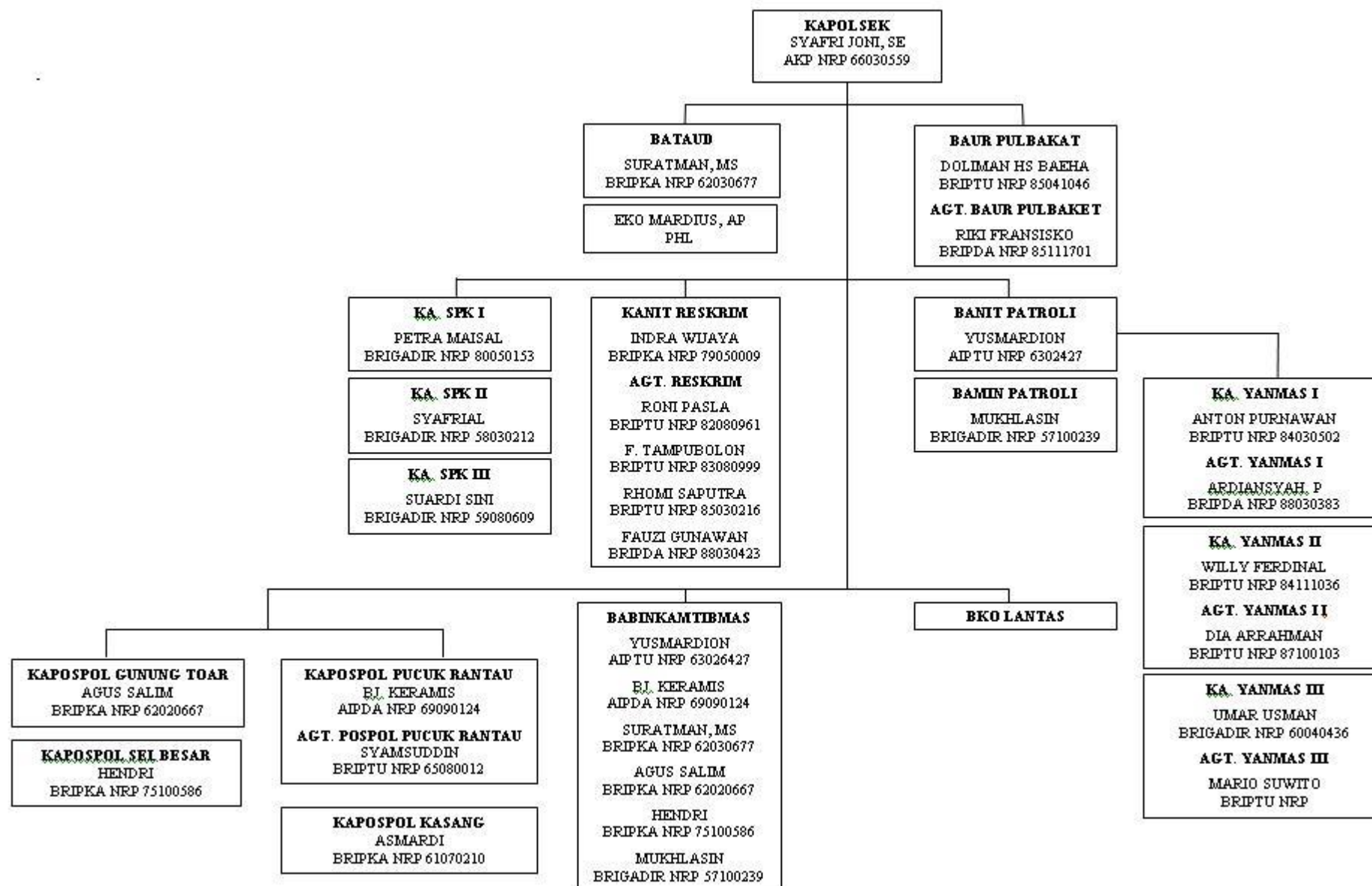
Sumber : Kepolisian Negara Republik Indonesia, 2007

Gambar 5 Peta Kepolisian Daerah Riau Tahun 2007



Sumber : Kepolisian Negara Republik Indonesia, 2007

Gambar 6 Struktur Organisasi Kepolisian Sektor Kuantan Mudik Tahun 2010



Sumber : Kepolisian Sektor Kuantan Mudik, 2010



## 5. Unit-Unit di Bawah Polsek

### - POLSEK

Adalah Unsur Utama Kewilayahan POLRES yang bertugas menyelenggarakan Tugas Pokok Polri dalam memelihara Kamtibmas, penegakan Hukum dan pemberian Pelindungan, Pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat serta tugas-tugas Polri Lain dalam wilayah hukumnya, sesuai Hukum dan peraturan/ Kebijakan yang berlaku dalam organisasi Polri dan Polsek dipimpin oleh Kapolsek.

### - UNIT RESKRIM

Adalah singkatan dari Unit Reserse Kriminal bertugas menyelenggarakan / membina fungsi penyelidikan Tindak Pidana, dengan memberikan pelayanan khusus kepada korban/ pelaku, remaja, anak, dan wanita serta menyelenggarakan fungsi identifikasi, baik untuk kepentingan penyidikan maupun pelayanan umum dan menyelenggarakan koordinasi dengan pengawasan Operasional dan Administrasi Penyidikan PPNS, sesuai ketentuan Hukum dan perundang-undangan. Unit Reskrim dalam Pelaksanaan tugas di bawah kendali Kapolsek.

### - LANTAS

Sebagai unit lintas yang bertugas sebagai terjawab dan Dikmas Lintas yang bertanggung jawab terhadap kejadian laka lintas di wilayah hokum Polsek

Kuantan Mudik dan melaporkan setiap kejadian kepada Kapolsek, Pengawas di lapangan dan Pelaksana di lapangan.

- BABINKAMTIBMAS

Adalah singkatan dari Bintara Pembina

Keamanan dan Ketertiban Masyarakat salah satu unsur Pembina Masyarakat sebagai upaya untuk mendorong peningkatan kesadaran dan ketaatan warga masyarakat terhadap Hukum perundang-undangan serta peran masyarakat dalam pengamalan Swakarsa.

- SPK

Adalah singkatan dari Sentra Pelayanan Kepolisian, salah satu unsur utama Polsek yang terdiri dari 3 unit dan disusun berdasarkan pembagian waktu. Dalam pelaksanaan tugas SPK memberikan pelayanan Kepolisian kepada warga masyarakat yang membutuhkan dalam bentuk penerimaan dan penanganan. Pertama Laporan/ pengaduan, pelayanan permintaan bantuan/ pertolongan Kepolisian. Masing-masing unit SPK yang dipimpin oleh Kepala SPK bertanggung jawab kepada Kapolsek.

- POS POL

Adalah singkatan dari Pos Polisi yang dipimpin oleh Kapospol. Dalam daerah Hukum Polsek pada kawasan tertentu untuk penanganan tugas-tugas pelayanan Kepolisian di titik beratkan pada tugas-tugas umum.

## **F. Kepolisian**

Kepolisian adalah institusi kemiliteran dan identik dengan kedisiplinan namun tidak menutup kemungkinan terjadinya masalah rumah tangga kepada anggota personilnya. Pernikahan adalah awal pembentukan keluarga dalam ruang lingkup rumah tangga. Ia merupakan pintu masuk yang menghubungkan seseorang dengan kehidupan dunia yang sesungguhnya sebagai insan yang sempurna. Sedangkan rumah tangga yang Islami adalah basis pertama dari masyarakat yang berdiri di atas dasar dan kecintaan dan kasih sayang. Ikatan rumah tangga lebih kuat dan kokoh daripada ikatan-ikatan lainnya yang terdapat dalam kehidupan masyarakat.

### **1. Polisi Sebagai Manusia**

Pada dasarnya polisi hanyalah manusia biasa yang tak luput dari kesalahan dan kekhilapan. Namun profesi ataupun karier sebagai polisi menuntut lebih akan perjalanan pengawalan norma – norma hukum yang berlaku. Sehingga celah akan sebuah kesalahan tentunya tidak dapat ditolerir karna sebagai penegak hukum polisi harus dapat berjalan sesuai koridor hukum. Adanya penyelewengan – penyelewengan yang terjadi dalam penjalan tugas, akan menyebabkan kegagalan dalam penegakan hukum itu sendiri, maka dari pada itu untuk mengawal polisi untuk tetap berada pada jalur hukum yang berlaku maka dibentuklah lembaga pengawas baik dari dalam lingkup kepolisian itu sendiri maupun independen dalam artian di luar dari institusi POLRI. Hal ini berfungsi demi terbentuknya polisi yang humanis, dan bersih.

## **2. Polisi Sebagai Anggota Masyarakat**

Dalam kehidupan bermasyarakat polisi dituntut untuk lebih membaaur dan menjalin kerjasama dengan masyarakat, apalagi dengan istilah POLMAS (polisi Masyarakat) yang dicanangkan oleh kepolisian, maka arogansi yang selama ini memisahkan antara masyarakat dan aparat dapat dihilangkan sehingga kerjasama dalam bentuk menjaga ketertiban dan keamanan dapat terwujud. Polisi dalam bermasyarakat diharapkan untuk lebih mencerminkan kepatuhan ketaatan kepada hukum yang berlaku, sehingga membangun kepercayaan masyarakat akan kredibilitas POLRI dapat terwujud.

## **3. Polisi Sebagai Abdi Masyarakat**

Sebagai landasan akan dipergunakan pengertian (definisi) "Community Policing" yang dipergunakan mantan Kapolri Sutanto (hal. 32-39). Dengan merujuk pada Dr.C. Robert C. Trojanowicz (1994) dideskripsikan Community Policing sebagai "a philosophy of full service personalized policing". Dan sehubungan dengan Sistem Peradilan Pidana (SPP/CJS) dapat digambarkan sebagai suatu sistem dengan kepolisian, kejaksaan dan pengadilan serta lembaga pemasyarakatan sebagai subsistemnya. Pelanggar hukum berasal dari masyarakat dan akan kembali pula ke masyarakat. Diperlukan keterpaduan kerja dalam SPP ini. implementasi strategi Polmas dari aspek penegakan hukum juga dilakukan dengan pendekatan "pencegahan/penangkalan kejahatan" (crime prevention) melalui SPP

Terpadu (integrated criminal justice system).

#### Pendekatan Terpadu Dalam SPP

Sistem peradilan pidana bertujuan untuk "menanggulangi kejahatan", dalam arti "mengendalikan kejahatan" agar berada dalam batas-batas toleransi masyarakat. Tersirat di sini pengakuan bahwa "melenyapkan kejahatan" adalah mustahil; ungkapan orang bijak adalah bahwa "setiap masyarakat (komuniti), akan menghasilkan pelaku kejahatan yang patut didapatnya".<sup>9</sup> Batas-batas toleransi masyarakat diukur dengan keberhasilan SPP menyelesaikan sebagian besar dari keluhan dan laporan kejahatan yang terjadi, dengan cara membawa pelakunya ke pengadilan dan menerima pidana (polisi sebagai "crime fighter").

Peranan dan kerjasama (terpadu) kepolisian, kejaksaan dan pengadilan tercermin dalam uraian di atas. Namun ini bukanlah keseluruhan tugas SPP. Tugas yang tidak kalah utamanya adalah mencegah terjadinya kejahatan, berarti mencegah warga masyarakat menjadi korban pelaku kejahatan. Di sini peran kepolisian adalah sentral. Di samping kedua tugas di atas, masih ada pula tugas ketiga, yaitu mencegah bahwa mereka yang sedang ataupun telah selesai menjalankan pidana tidak mengulangi lagi perbuatan mereka (tidak menjadi residivis) yang melanggar hukum itu. Di sini peranan lembaga pemasyarakatan adalah sentral.

Kalau dilihat dari sisi masyarakat, menurut urutan prioritas mereka, maka tugas yang dibebankan kepada SPP adalah:

1. mencegah masyarakat menjadi korban kejahatan,

---

<sup>9</sup> Mardjono Reksodiputro, a.l. Buku Kedua: Kriminologi dan Sistem Peradilan Pidana, LKUI, 1994, hal. 98

2. menyelesaikan kejahatan yang terjadi, dan
3. mengusahakan agar pelaku kejahatan tidak mengulangi lagi kejahatan setelah dipidana.

Keempat unsur SPP di atas: kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan lembaga pemasyarakatan dapat ditambah satu unsur lagi, yaitu lembaga advokat (lembaga pembela) yang sebenarnya lebih berperan di lembaga pengadilan, agar terdakwa-pelaku memperoleh peradilan yang wajar (a fair trial). Keempat atau kelima unsur SPP ini, masing-masing berdiri sendiri secara administratif. Kerjasama erat keterpaduan dalam sistem, dengan masing-masing melaksanakan fungsinya, adalah suatu keharusan, karena paling tidak ada 3 (tiga) kerugian yang dapat terjadi, apabila tidak bekerja sebagai sistem terpadu:

1. kesukaran dalam menilai sendiri keberhasilan atau kegagalan masing-masing, sehubungan dengan fungsi mereka dalam mengendalikan kejahatan;
2. kesulitan dalam memecahkan sendiri masalah pokok masing-masing, karena keterkaitannya dalam pelaksanaan tugas bersama;
3. dan apabila tanggung jawab masing-masing unsur tidak jelas terbagi berdasarkan kesepakatan bersama, maka masing-masing unsur cenderung tidak memperhatikan aktivitas menyeluruh dari sistem ini.

Keterpaduan bekerja unsur-unsur dalam SPP yang merupakan solusi menghindari ketiga kerugian di atas, di Jepang dimisalkan sebagai: "seperangkat roda-gigi (seperti dalam arloji) yang secara cermat dan ulet terus menjaga kombinasi yang baik antara kerja masing-masing roda-gigi tersebut (agar tujuan tercapai)." Kerugian kelemahan salah satu unsur SPP yang dapat merambat ke

unsur-unsur lain, dapat dimisalkan dengan "teori bejana - berhubungan": "satu titik tinta dalam air salah satu bejana, secara lambat tapi pasti akan mengeruhkan air semua bejana-bejana tersebut". Pencegahan Kejahatan (Secara Umum):

1. Bahwa Polmas mempunyai falsafah kerja kepolisian yang bersifat personal (dalam arti anggota polisi yang sama bertugas di komuniti yang sama);
2. Bahwa Polmas mempunyai gaya manajemen dan strategi organisasi yang memprioritaskan pemecahan permasalahan secara pro-aktif (bukan re-aktif) bersama-sama dengan masyarakat;
3. Bahwa Polnas mempunyai tujuan memahami dan menanggulangi sebab kejahatan maupun sebab permasalahan lain dalam masyarakat, dengan bekerja dalam hubungan kemitraan polisi-masyarakat (polisi sebagai "problem solver").

Uraian yang lebih luas akan diberikan pada tujuan Polmas bekerja dalam kemitraan dengan masyarakat, menanggulangi kejahatan maupun masalah-masalah sosial lainnya yang ada dalam wilayah kerja anggota polisi bersangkutan (butir 3 di atas).

Dalam membuat strategi pelaksanaan (implementasi) pemolisian komuniti, agar implementasi atau aktivitasnya harus berupa:

1. memprioritaskan (mendahulukan) usaha pencegahan kejahatan secara umum (general crime prevention programs);
2. berupaya memahami keinginan masyarakat untuk dapat "merasa-aman" ataupun sekurang-kurangnya menghilangkan "rasa-takut" terhadap

kemungkinan gangguan kejahatan ataupun gangguan ketertiban lainnya (the feeling of safety and security); dan

3. membangun, mengembangkan dan merawat hubungan kemitraan

Polisi dengan Masyarakat (termasuk LSM) untuk bersama-sama menyelesaikan masalah-masalah sosial yang ada dalam komunitas bersangkutan (to solve the social problems in the respective community).

Dalam konsep luar negeri (Amerika Serikat) maka pendekatan ini diberi nama (istilah) COPPS (Community Oriented Policing and Problem Solving), atau "Pemolisian dan Pemecahan Masalah (oleh Kepolisian) Yang Berorientasi Pada Masyarakat

Adapun program-program pencegahan kejahatan yang akan diimplementasikan di bawah (lembaga) Polmas dengan falsafah pemolisian komuniti harus berorientasi pada keperluan nyata komunitas bersangkutan: rasa aman di rumah, di lingkungan kerja dan di lingkungan RT, RW dan Kelurahan. Antara lain mulai dapat diprogramkan cara-cara "akal-sehat" (common-sense) meningkatkan keamanan di rumah, di pekerjaan dan di daerah pemukiman dan daerah usaha (safety at home, at the job and in the neighborhood).

### **Keperluan Beralih dari Perpolisian Tradisional**

Dalam konteks SPP yang diuraikan di atas, tujuan sistem adalah menanggulangi kejahatan dengan ukuran keberhasilan penyelesaian laporan (kasus) dan penghukuman pelaku. Proses SPP ini memang berat (lebih berfokus) pada cara kerja re-aktif (menangani laporan kasus) dan bersifat represif



(membawa pelaku ke pengadilan untuk dihukum). Seperti dikatakan oleh mantan Kapolri Sutanto: "... kualitas pelayanan ... terjebak hanya pada peningkatan kemampuan teknis yang bersifat represif.<sup>10</sup> Memang "perpolisian tradisional" lebih menekankan pada angka statistik penyelesaian kasus ("crimes solved" atau "offenses cleared by arrest") yang merapakan parameter "hard data" untuk membuktikan berhasilnya kegiatan (pekerjaan, tugas) kepolisian. Pada hal parameter "soft data" tidak kalah pentingnya untuk mengukur kesuksesan kerja kepolisian. Membangun "rasa-aman" dan menghilangkan "rasa-takut" hanya dapat terjadi melalui kegiatan dengan falsafah pemolisian komuniti, yang mengubah "paradigma lama" dengan "paradigma baru".<sup>11</sup>

Seperti dikemukakan di atas, pemolisian komuniti (sebagai kegiatan lembaga Polmas) merupakan falsafah kerja, gaya manajemen dan strategi organisasi. Dengan demikian paradigma baru membawa implikasi (akibat langsung) bagi manajemen dan struktur organisasi.<sup>12</sup> Gaya manajemen dan strategi organisasi ini harus mengharmonisasikan antara "penegakan hukum" (law enforcement) dan "pencegahan dan pemecahan masalah sosial" (prevention and solution of social problems) untuk meningkatkan keamanan (safety) dalam masyarakat. Inilah hubungan antara (lembaga) Polmas (CP as an institution)

---

<sup>10</sup> Drs. Sutanto, jend. Pol, POLMAS: Paradigma Baru Polri, YPKIK, 2006 Sutanto, h. 39

<sup>11</sup> ibid hal. 41

<sup>12</sup> Drs. Ronny Lihawa (editor), Memahami Community Policing (judul asli : Understanding Community Policing, a Framework for Action}, YPKIK, August 2005; TOR: "Implementasi Strategi Perpolisian Masyarakat Dalam Upaya Memelihara Kamtibmas Dalam Rangka Mewujudkan Keamanan Dalam Negeri", h. 31

dengan COPPS (Community Oriented Policing and Problem Solving) sebagai program kepolisian.<sup>13</sup>

Melalui uraian ini ingin ditekankan bahwa dewasa ini diseluruh dunia "gaya pemolisian" (policing style) telah diubah (mengalami rekonstruksi) dengan mengedepankan kepentingan komunitas penghunian (residential communities) dan komunitas kebudayaan (cultural communities). Perkembangan di kota-kota Indonesia dan perkembangan lokalitas kebudayaan di daerah perkotaan maupun pedesaan dalam masyarakat majemuk Indonesia, karena itu perlu diperhatikan dan dipahami oleh kepolisian. Terutama dalam kerangka atau keterkaitannya dengan lembaga Polmas.

Gaya pemolisian yang berubah ini menekankan agar anggota polisi (atau kantor kepolisian) mempercayai masukan dari masyarakat (rely on input from the community), dalam memutuskan kegiatan-kegiatan jenis apa yang diperlukan komunitas lokal yang bersangkutan (ini yang dimaksud dengan "community oriented approach"} dan yang akan merupakan kegiatan utama (prioritas) kepolisian. Setelah permasalahan diidentifikasi dan diberikan prioritas, maka diperlukan kegiatan bersama untuk pemecahannya.<sup>14</sup>

Suatu model cara (proses) pemecahan permasalahan adalah yang dikenal sebagai Scanning - Analysis - Response - dan Assessment (disingkat S.A.R.A). Pertama, harus ditentukan "apa permasalahannya" (scanning), selanjutnya perlu "dikupas permasalahannya" (analysis), kemudian dicari bersama "respon yang sesuai" (response), dan terakhir jangan lupa melakukan "penilaian hasil respon

---

<sup>13</sup> Ibid h. 21-30

<sup>14</sup> ibid h. 26

polisi" (assessment) apakah efektif dan apakah ada kemajuan (improvement) dalam "kualitas hidup" komunitas bersangkutan. Dalam menjalani proses ini, bukan saja partisipasi aktif masyarakat diusahakan, tetapi juga harus dipikirkan respon-respon dengan pendekatan yang lebih kreatif dan inovatif.

### **Polisi dan Pengelolaan Konflik**

Pekerjaan kepolisian dapat dinamakan "pengelolaan konflik", baik dalam penegakan hukum (law enforcement) maupun dalam pemecahan masalah (problem solving). Kedua jenis pengelolaan konflik ini memang berbeda, dan karena itu wajah polisi dapat "angker" (dalam menegakkan hukum), tetapi dapat pula "tersenyum" (dalam berusaha mendamaikan dengan memecahkan masalah). Ada berbagai jenis "konflik" dan juga berbagai peran polisi dalam memecahkan masalah konflik, yang terakhir ini misalnya sebagai "mediator" (perantara) ataupun "negosiator".<sup>15</sup>

pengertian konflik ini lebih konseptual dan berdasarkan pada pemahaman bahwa warga masyarakat itu punya perspektif atau pandangan yang sering berbeda tentang kehidupan ini serta permasalahannya. Tindakan kita dan penolakan kita terhadap perilaku tertentu (misalnya yang dipersepsikan sebagai perilaku menyimpang atau melanggar hukum) didasarkan pada nilai-nilai yang kita miliki dan yang mempedomani dan memotivasi pikiran dan perilaku kita. Dan apabila dua (atau lebih) pihak (baik individu, maupun kelompok) berhubungan dengan memiliki (atau merasa memiliki) sasaran-sasaran yang tidak sejalan, maka

---

<sup>15</sup> Parsudi Suparlan (Editor), Bunga Rampai Ilmu Kepolisian Indonesia, YPKIK, 2004. h. 113

terjadilah "konflik". Konflik ini tidak perlu dalam bentuk kekerasan, dan bukannya tidak mungkin bahwa "konflik" itu juga dapat kreatif.

Dalam penegakan hukum (dengan mempergunakan kewenangannya menangkap, menahan, menggeledah dan menyita) polisi mengelola "konflik" (warga yang melanggar hukum) dengan kekerasan (force, bukan violence). Di sini polisi menunjukkan wajahnya yang "angker". Tetapi dalam kegiatan pemecahan masalah, wajah yang diperlihatkan polisi adalah wajah yang tersenyum. Di sini terjadi pengelolaan "konflik" (misalnya karena polarisasi nilai atau komunikasi antar budaya yang berbeda atau karena masalah ketidaksetaraan dan rasa ketidakadilan) oleh polisi, yang bertujuan membatasi dan menghindari kekerasan (dengan mendorong a.l. perubahan perilaku atau persetujuan perdamaian atau dengan membangun hubungan baru). Polmas dapat mengelola konflik dalam kedua bentuk di atas, baik dengan kekerasan (wajah angker) maupun tidak (wajah tersenyum). Namun selalu yang harus dikedepankan adalah "keinginan" atau "masukan" masyarakat dan dikelola bersama dengan masyarakat.

Masyarakat Indonesia yang majemuk ini sangat potensial mengalami "community conflicts" Karena itu mereka yang bertugas dalam lembaga Polmas harus disiapkan untuk menghadapi timbulnya konflik-konflik yang laten maupun manifes (tidak terlihat dan yang terlihat). Potensi konflik juga dapat timbul dari mereka yang menjadi atau merasa menjadi korban dari ketidakadilan ataupun dari diskriminasi. Polmas karena itu juga harus mempunyai bagian yang mengurus keluhan warga masyarakat yang merasa menjadi korban kejahatan maupun ketidakadilan sosial, politik ataupun budaya.

Adanya Surat Keputusan Kapolri No. 737/X/2005, tanggal 13 Oktober 2005, yang berisi lampiran: "Kebijakan dan Strategi Penerapan Model Perpolisian Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Tugas Polri", memang baik untuk menyamakan persepsi dan pemahaman kita tentang Community Policing.

Perjalanan untuk mencapai Polri dengan polisi sipil yang profesional dan modern serta demokratis memerlukan waktu. Namun pepatah kuno dari Cina mengatakan: "Perjalanan seribu mil, harus dimulai dengan satu langkah-awal". Langkah-langkah awal sudah diayunkan dan mudah-mudahan perjalanan ini tidak banyak mengalami hambatan.

Lembang-Bandung, 11 Mei 2006, Disampaikan dalam Seminar "Implementasi Strategi Perpolisian Masyarakat Dalam Upaya Memelihara Kantibmas Dalam Rangka Mewujudkan Kamdagri" untuk PASIS SESPIM DIK REG 42 T.P. 2006.

### **BAB III**

#### **TINJAUAN TEORITIS MOTIV DAN AKIBAT PERCERAIAN**

##### **A. Pengertian dan Kedudukan Perceraian**

Pengertian perceraian atau disebut juga talaq adalah pemutusan tali perkawinan.<sup>1</sup> Sedangkan menurut Kompilasi Hukum Islam adalah :

Pasal 117

Talak adalah ikrar suami di hadapan sidang Pengadilan Agama yang menjadi salah satu sebab putusnya perkawinan, dengan cara sebagaimana dimaksud dalam pasal 129, 130, dan 131.

Oleh karena dalam hukum Islam, hak cerai terletak pada suami, maka di Pengadilan Agama ataupun di Pengadilan Negeri terdapat istilah Cerai Talak, namun ada juga yang disebut sebagai cerai gugat. Dalam kehidupan sehari-hari, masyarakat hanya mengenal istilah talak satu, talak dua dan talak tiga. Di mana talak yang dijatuhkan oleh suami disebut sebagai cerai talak, dan, talak yang diajukan oleh istri dinamakan cerai gugat. Dalam menangani kasus perceraian pengadilan mempunyai peranan memberikan legal formal, dalam bentuk pemberian surat sah atas permohonan talak dari suami. Surat talak tersebut diberikan dengan mengacu pada alasan-alasan sebagaimana diatur dalam pasal 39 ayat 2, di mana salah satu pihak dinyatakan melanggar hak dan kewajiban.

---

<sup>1</sup> Syaikh Hasan Ayyub, Fiqih Keluarga, (Jakarta Timur, Dar At-Tauji Wa An-Nashr Al-Islamiyyah.1999) h.247

Pernikahan merupakan awal dari hidup bersama antara seorang pria dan seorang wanita yang diatur dalam peraturan perundangundangan yang berlaku. Dalam semua tradisi hukum, baik *civil law*, *common law*, maupun *Islamic Law*, perkawinan adalah sebuah kontrak berdasarkan persetujuan sukarela yang bersifat pribadi antara seorang pria dan seorang wanita untuk menjadi suami isteri. Dalam hal ini, perkawinan selalu dipandang sebagai dasar bagi unit keluarga yang mempunyai arti penting bagi penjagaan moral atau akhlak masyarakat dan pembentukan peradaban.<sup>2</sup>

Perkawinan sebagai perjanjian atau kontrak ('aqd), maka pihak-pihak yang terikat dengan perjanjian atau kontrak berjanji akan membina rumah tangga yang bahagia lahir bathin dengan melahirkan anak cucu yang meneruskan cita-cita mereka. Bila ikatan lahir bathin tidak dapat diwujudkan dalam perkawinan, misalnya tidak lagi dapat melakukan hubungan seksual, atau tidak dapat melahirkan keturunan, atau masing-masing sudah mempunyai tujuan yang berbeda, maka perjanjian dapat dibatalkan melalui pemutusan perkawinan (perceraian) atau paling tidak ditinjau kembali melalui perkawinan kembali setelah terjadi perceraian "*ruju*".<sup>3</sup>

Bagi orang Islam, perceraian lebih dikenal dengan istilah talak. Menurut Sayyid Sabiq, talak adalah

### حل رابطة الزواج وانهاء العلاقة الزوجية

<sup>2</sup>Rifyal Ka'bah, *Permasalahan Perkawinan*, (Jakarta ,dalam Majalah Varia Peradilan, No 271 Juni 2008, IKAHI) h. 7

<sup>3</sup> <sup>4</sup> Ibid.

*Artinya : ” melepaskan ikatan perkawinan atau bubarnya hubungan perkawinan”.*<sup>4</sup>

Menurut HA. Fuad Sa'id yang dimaksud dengan perceraian adalah putusnya perkawinan antara suami dengan isteri karena tidak terdapat kerukunan dalam rumah tangga atau sebab lain seperti mandulnya isteri atau suami dan setelah sebelumnya diupayakan perdamaian dengan melibatkan keluarga kedua belah pihak.<sup>5</sup>

Dari uraian di atas dapat diketahui, bahwa *Pertama*; perceraian baru dapat dilaksanakan apabila telah dilakukan berbagai cara untuk mendamaikan kedua belah pihak untuk tetap mempertahankan keutuhan rumah tangga mereka dan ternyata tidak ada jalan lain kecuali hanya dengan jalan perceraian. Dengan perkataan lain bahwa perceraian itu adalah sebagai *way out* bagi suami isteri demi kebahagiaan yang dapat diharapkan sesudah terjadinya perceraian terjadi. *Kedua*; bahwa perceraian itu merupakan sesuatu yang dibolehkan namun dibenci oleh agama. Berdasarkan sabda Rasul:

**ابغض الحلال عند الله الطلاق (رواه ابو داود والحاكم)**

*Artinya : “Hal yang halal tetapi paling dibenci menurut Allah adalah perceraian”*

---

<sup>4</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqhusunnah*, Darul Fikri, Beirut, Jilid II, h.206 tt.

<sup>5</sup> Abdul Manan, *Problematika Perceraian Karena Zina dalam Proses Penyelesaian Perkara di Lingkungan Peradilan Agama*, dalam Jurnal Mimbar Hukum, al-Hikmah & DITBINBAPERA, Jakarta.No 52 Th XII 2001 h. 74



Dalam sebuah hadits, ada ancaman khusus bagi seorang isteri yang meminta jatuhnya talak dari suaminya tanpa disertai alasan yang dibenarkan syara. Rasul bersabda:

أَيُّمَا امْرَأَةٍ سَأَلَتْ زَوْجَهَا طَلَاقًا مِنْ غَيْرِ بَأْسٍ فَحَرَامٌ عَلَيْهَا رَائِحَةُ الْجَنَّةِ  
(رواه اصحاب السنن والترمذى حسنه)

*Artinya : "Siapa saja isteri yang menuntut cerai kepada suaminya tanpa alasan yang jelas, maka ia haram menghirup wanginya surga"*<sup>6</sup>.

Al-Qur'an sebagai sumber hukum Islam pertama, dalam banyak kesempatan selalu menyarankan agar suami isteri bergaul secara ma'ruf dan jangan menceraikan isteri dengan sebab-sebab yang tidak prinsip. Jika terjadi pertengkaran yang sangat memuncak diantara suami isteri dianjurkan bersabar dan berlaku baik untuk tetap rukun dalam rumah tangga, tidak langsung membubarkan perkawinan mereka, tetapi hendaklah menempuh usaha perdamaian terlebih dahulu dengan mengirim seorang hakam dari keluarga pihak suami dan seorang hakam dari keluarga pihak isteri untuk mengadakan perdamaian. Jika usaha ini tidak berhasil dilaksanakan, maka perceraian baru dapat dilakukan. Secara garis besar hukum Islam membagi perceraian kepada dua golongan besar yaitu *talak* dan *fasakh*. Talak adalah perceraian yang timbul dari tindakan suami untuk melepaskan ikatan dengan lafadz talak dan seumpamanya, sedangkan fasakh adalah melepas ikatan perkawinan antara suami isteri yang biasanya dilakukan oleh isteri. Dari dua

---

<sup>6</sup> Sayyid Sabiq. *Lokcit.h.* 207

golongan perceraian ini, Dr. Abdurrahman Taj sebagaimana dikutip oleh H.M Djamil Latief, S.H. membuat klasifikasi perceraian sebagai berikut, (1) Talak yang terjadi dengan keputusan hakim yaitu li'an, perceraian dengan sebab aib suami seperti impotent dan perceraian dengan sebab suami menolak masuk Islam, (2) Talak yang terjadi tanpa putusan Hakim yaitu talak biasa yakni talak yang diucapkan suami baik sharih maupun kinayah dan 'ila, (3) fasakh yang terjadi dengan keputusan hakim yaitu dengan sebab perkawinannya anak laki-laki atau perempuan yang masih di bawah umur dan perkawinan itu tidak dilakukan oleh wali yaitu bapaknya atau kakeknya, fasakh dengan sebab salah satu pihak dalam keadaan gila, tidak sekufu, kurangnya mas kawin dari mahar mitsil dan salah satu pihak menolak masuk Islam, (4) fasakh yang terjadi tanpa adanya putusan 5 hakim, yaitu fasakh dengan sebab merdekanya isteri, ada hubungan semenda antara suami isteri dan nikahnya fasid sejak semula.<sup>7</sup>

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Kompilasi Hukum Islam Indonesia sebagai bentuk mempositifkan hukum Islam mengklasifikasi penyebab terjadinya perceraian kepada (1) Kematian salah satu pihak, (2) Perceraian karena talak dan perceraian karena gugat, (3) keputusan Pengadilan.<sup>8</sup>

Dalam hukum Belanda, Perceraian dikenal sebagai salah satu penyebab bubarnya perkawinan. Hal ini sebagaimana tercantum dalam pasal

---

<sup>7</sup> Abdul Manan, *Lokcit*, h.12.

<sup>8</sup> *Ibid.*

199 BW Dalam pasal 199 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (*Burgerlijke Wet Book*) disebutkan Perkawinan dapat bubar karena (1) kematian salah satu pihak, (2) keadaan tidak hadirnya suami atau isteri selama 10 Tahun diikuti perkawinan baru si isteri atau suami setelah mendapat izin dari Hakim, (3) karena putusan hakim setelah adanya perpisahan meja dan ranjang, serta pembuktian bubarnya perkawinan dalam register catatan sipil, (4). Perceraian.<sup>9</sup>

## B. Perkembangan Alasan Perceraian

Pada dasarnya hukum Islam menetapkan bahwa alasan perceraian hanya satu macam saja yaitu pertengkaran yang sangat memuncak dan membahayakan keselamatan jiwa yang disebut dengan “*syiqaq*” sebagaimana Firman Allah dalam al-Qur’an Surat an- Nisa ayat 35 yang berbunyi:

Artinya : “ dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara keduanya, Maka kirimlah seorang hakam (juru pendamai) dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan. jika kedua orang hakam itu bermaksud Mengadakan perbaikan,

<sup>9</sup>*Ibid*

*niscaya Allah memberi taufik kepada suami-isteri itu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal”.*

Sedangkan menurut hukum Perdata, perceraian hanya dapat terjadi berdasarkan alasan-alasan yang ditentukan Undang-undang dan harus dilakukan di depan sidang Pengadilan.<sup>10</sup>

Dalam kaitan ini ada dua pengertian yang perlu dipahami yaitu istilah “bubar nya perkawinan” dan “perceraian”. Perceraian adalah salah satu sebab dari bubar nya atau putus nya perkawinan.

Dalam pasal 199 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (BW) disebutkan Perkawinan dapat bubar karena (1) kematian salah satu pihak, (2) keadaan tidak hadir nya suami atau isteri selama 10 Tahun diikuti perkawinan baru si isteri atau suami setelah mendapat izin dari Hakim, (3) karena putusan hakim setelah adanya perpisahan meja dan ranjang, serta pembuktian bubar nya perkawinan dalam register catatan sipil, (4). Perceraian. Sedangkan perceraian yang menjadi dasar bubar nya perkawinan adalah perceraian yang tidak didahului oleh perpisahan meja dan ranjang. Tentang hal ini ditentukan dalam pasal 209 Kitab Undang-undang Hukum Perdata yaitu (1) Zina baik yang dilakukan oleh suami atau isteri, (2) Meningggalkan tempat tinggal bersama dengan sengaja, (3) Suami atau isteri dihukum selama 5 tahun penjara atau lebih yang dijatuhkan setelah perkawinan dilaksanakan, (4) Salah satu pihak melakukan penganiyaan berat yang membahayakan jiwa pihak lain (suami/isteri). Lebih lanjut dalam pasal

---

<sup>10</sup> <sup>11</sup> Yahya Harahap, *Beberapa Permasalahan Hukum Acara pada Peradilan Agama*, al-Hikmah, Jakarta, h. 133, th 1975

208 KUH Perdata bahwa perceraian tidak dapat dilaksanakan berdasarkan atas persetujuan antara suami dan isteri. Dalam pasal 38 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan bahwa putusnya perkawinan dapat terjadi karena salah satu pihak meninggal dunia, karena perceraian dan karena adanya putusan pengadilan . Kemudian dalam pasal 39 ayat (2) ditentukan bahwa untuk melaksanakan perceraian harus cukup alasan yaitu antara suami isteri tidak akan hidup sebagai suami isteri . Ketentuan ini dipertegas lagi dalam penjelasan pasal 39 ayat (2) tersebut dan pasal 19 Peraturan pemerintah Nomor 9 tahun 1975 yang mana disebutkan bahwa alasan yang dapat dipergunakan untuk melaksanakan perceraian adalah: 7

- Salah satu pihak berbuat zina atau pemabuk, pemadat dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan
- Salah satu pihak meninggalkan pihak yang lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemauannya.
- Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung
- Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiyaan berat yang membahayakan pihak lain.
- Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit yang menyebabkan tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami isteri.
- Antara suami isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Alasan perceraian ini adalah sama seperti yang tersebut dalam pasal 116 Kompilasi Hukum Islam dengan penambahan dua ayat yaitu: (a) suami melanggar taklik talak dan (b) peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga.

### **C. Motiv Perceraian**

Menurut Dodi Ahmad Fauzi (Dodi Ahmad Fauzi, 2006 : 4), ada beberapa faktor – faktor penyebab perceraian antara lain adalah sebagai berikut :

#### **1. Ketidakharmonisan dalam rumah tangga**

Alasan tersebut di atas adalah alasan yang paling kerap dikemukakan oleh pasangan suami – istri yang akan bercerai. Ketidakharmonisan bisa disebabkan oleh berbagai hal antara lain, krisis keuangan, krisis akhlak, dan adanya orang ketiga. Dengan kata lain, istilah keharmonisan adalah terlalu umum sehingga memerlukan perincian yang lebih mendetail.

#### **2. Krisis moral dan akhlak**

Selain ketidakharmonisan dalam rumah tangga, perceraian juga sering memperoleh landasan berupa krisis moral dan akhlak, yang dapat dilalaikannya tanggung jawab baik oleh suami ataupun istri, poligami yang tidak sehat, penganiayaan, pelecehan dan keburukan perilaku lainnya yang dilakukan baik oleh suami ataupun istri, misal mabuk, berzinah, terlibat tindak kriminal, bahkan utang piutang.

### 3. Perzinahan

Di samping itu, masalah lain yang dapat mengakibatkan terjadinya perceraian adalah perzinahan, yaitu hubungan seksual di luar nikah yang dilakukan baik oleh suami maupun istri

### 4. Pernikahan tanpa cinta

Alasan lainnya yang kerap dikemukakan oleh suami dan istri, untuk mengakhiri sebuah perkawinan adalah bahwa perkawinan mereka telah berlangsung tanpa dilandasi adanya cinta. Untuk mengatasi kesulitan akibat sebuah pernikahan tanpa cinta, pasangan harus merefleksi diri untuk memahami masalah sebenarnya, juga harus berupaya untuk mencoba menciptakan kerjasama dalam menghasilkan keputusan yang terbaik.

### 5. Adanya masalah-masalah dalam perkawinan

Dalam sebuah perkawinan pasti tidak akan lepas dari yang namanya masalah. Masalah dalam perkawinan itu merupakan suatu hal yang biasa, tapi percekcoakan yang berlarut-larut dan tidak dapat didamaikan lagi secara otomatis akan disusul dengan pisah ranjang.<sup>11</sup>

Langkah pertama dalam menanggulangi sebuah masalah perkawinan adalah :

1. Adanya keterbukaan antara suami – istri
2. Berusaha untuk menghargai pasangan
3. Jika dalam keluarga ada masalah, sebaiknya diselesaikan secara baik - baik
4. Saling menyayangi antara pasangan

---

<sup>11</sup> Dodi Ahmad Fauzi, *Mengatasi Problem Keluarga*,( Jakarta. 2006) : h.4

## **D. Akibat yang Ditimbulkan Perceraian**

### **1. Harta Bersama**

Perceraian yang timbul antara suami dan isteri melahirkan akibat, diantaranya adalah pembagian harta bersama. Dalam bahasa Belanda disebut *gemenschap*.

Sebenarnya konsep harta bersama dalam hukum Islam tidak ditemukan nash yang secara tegas menyebutkan hukum harta bersama baik dalam al-Qur'an maupun hadist. Karenanya hal ini merupakan ranah ijtihad bagi ulama yang memiliki kapasitas untuk melakukan ijtihad atau yang dikenal dengan istilah mujtahid.

Satria Effendi M. Zein menyebutkan bahwa dalam kultur masyarakat muslim berkaitan dengan harta yang diperoleh dalam sebuah pernikahan ada dua kultur yang berlaku, *pertama*; kultur masyarakat yang memisahkan antara harta suami dan harta isteri dalam sebuah rumah tangga. Dalam masyarakat muslim seperti ini, tidak ditemukan adanya istilah harta bersama. *Kedua*; masyarakat muslim yang tidak memisahkan harta yang diperoleh suami isteri dalam pernikahan. Masyarakat muslim seperti ini mengenal dan mengakui adanya harta bersama. Di Indonesia, adat kebiasaan masyarakat muslim yang mengakui adanya harta bersama sudah menjadi lebih kuat, karena telah dituangkan dalam pasal 35 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974.<sup>12</sup>

---

<sup>12</sup>Satria Effendi, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer*, Kencana, Jakarta. Cet. 2 h. 60-61



Sedangkan dalam hukum Belanda yang terdapat dalam Pasal 119 dan Pasal 126 Burgerlijk Wetboek disebutkan bahwa sejak saat dilangsungkan perkawinan, maka menurut hukum, terjadilah percampuran harta antara suami isteri yang disebut dengan harta bersama. Hal ini terjadi selama tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan. Harta bersama bubar atau berakhit demi hukum disebabkan; kematian salah satu pihak, perceraian, pisah meja dan ranjang dan karena pemisahan harta yang dituangkan dalam perjanjian sebelum terjadinya perkawinan. Dan dalam Pasal 127 BW, setelah bubarnya harta bersama, kekayaan mereka dibagi dua antara suami dan isteri atau antara para pewaris mereka tanpa mempersoalkan dari pihak mana asal barang-barang itu.

## **2. Pengurusan anak**

Perceraian di samping menimbulkan adanya pembagian harta bersama seperti yang diterangkan di atas, juga menimbulkan masalah pengurusan anak. Pengurusan anak atau dikenal dengan sebutan *hadlonah*. Hukum Islam menyebutkan bahwa apabila terjadi perceraian antara suami dan isteri, maka isterilah yang berhak mengasuh mendidik dan memelihara anak-anaknya selama anak-nya belum *mumayyiz*. Hal ini berdasarkan Sabda Nabi kepada seorang isteri yang mengadukan pengurusan anaknya setelah isteri tersebut bercerai dari suaminya. Nabi berkata: "*kaulah yang lebih berhak mendidik*

*anakmu selama kamu belum kawin dengan orang lain*". (Hadits riwayat Abu Dawud dan al- Hakim)<sup>13</sup>

Di samping dua akibat perceraian di atas, khusus dalam hukum Islam ada akibat-akibat lain yang timbul dari perceraian yang tidak ada dalam Hukum Belanda. Dalam hukum Islam ada ciri khas yang tidak ada dalam Hukum Belanda bahwa perceraian tidak sekaligus memutus hubungan suami isteri terutama perceraian dalam bentuk talak *raj'i* yang memberikan hak *ruju'* kepada suami sebelum masa '*iddah*-nya habis.

Untuk lebih jelasnya implikasi yang ditimbulkan perceraian dalam konsep hukum Islam selain yang telah dipaparkan di atas, penulis akan paparkan sebagai berikut:

## **1. Akibat talak**

### **1.1 Akibat Talak Raj'i**

Talak *raj'i* tidak menghalangi mantan suami berkumpul dengan mantan isterinya, sebab akad perkawinannya tidak hilang dan tidak menghilangkan hak (pemilikan), serta tidak mempengaruhi hubungannya yang halal (kecuali persetubuhan).<sup>14</sup>

Segala akibat hukum talak baru berjalan sesudah habis masa '*iddah* dan jika tidak ada *ruju'*. Sedangkan apabila masa '*iddah* telah habis maka tidak boleh *ruju'* dan berarti perempuan itu telah ter-talak *ba'in*. Jika masih ada dalam masa '*iddah* maka talak *raj'i* yang berarti tidak melarang suami berkumpul

---

<sup>13</sup> Ibid.

<sup>14</sup> A. Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, (kencana, Jakarta. 2006 cet.2 h. 265

dengan isterinya kecuali bersenggama. Jika ia menggaulinya istrinya berarti ia telah *ruju'*. Selama dalam masa '*iddah*, isteri yang ditalak *raj'i* masih berhak memperoleh tempat tinggal, pakaian, dan uang belanja dari mantan suaminya. Dan selama dalam masa '*iddah* bekas isteri wajib menjaga dirinya, tidak menerima pinangan dan tidak menikah dengan pria lain. Rasulullah SAW bersabda:

انما النفقة والسكنى للمرأة اذا كان للزوجة عليها الرجعة (رواه احمد والنسائي)

*Artinya : "Perempuan yang berhak mendapatkan nafkah dan tempat tinggal dari mantan suaminya adalah apabila mantan suaminya itu berhak merujuk kepadanya". (HR. Muslim).<sup>15</sup>*

Berkaitan dengan adanya konsep *ruju'* dalam hukum Islam, Syeikh Muhammad Ali As-Shabuni mengutip perkataan Ahmad Muhammad Jamal mengatakan bahwa Hukum Islam memiliki ciri khas dalam masalah perceraian yang tidak dimiliki oleh sistem hukum yang lain yaitu masalah *ruju'* atau bisa kembalinya seorang suami terhadap isteri yang dithalak satu dan dua selama belum habis masa '*iddah* (menunggu). Hal ini menunjukkan bahwa Islam sangat menginginkan kembalinya mantan suami dan mantan isteri tersebut dalam ikatan perkawinan sehingga keturunan keduanya dapat terpelihara dengan baik.<sup>16</sup>

---

<sup>15</sup>Ibid

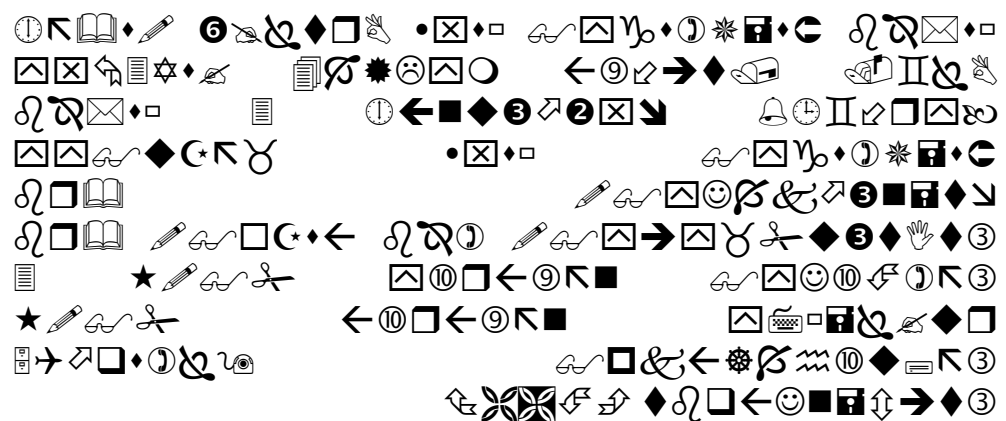
<sup>16</sup>Ali As-Shabuni, *Tafsir Rawa'iul Bayan fi Ayat al-Ahkam*, Darul Fikri, Beirut Juz I h. 344

## 1.2 Akibat Talak *Bain Shugra*

Talak *Ba'in Sughra* menghilangkan pemilikan bekas suami terhadap bekas isterinya tetapi tidak menghilangkan kehalalan bekas suami untuk menikahi kembali dengan mantan isterinya, artinya bekas suami boleh mengadakan akad nikah baru dengan bekas isteri, baik dalam masa 'iddah-nya maupun sesudah berakhir masa 'iddah-nya.

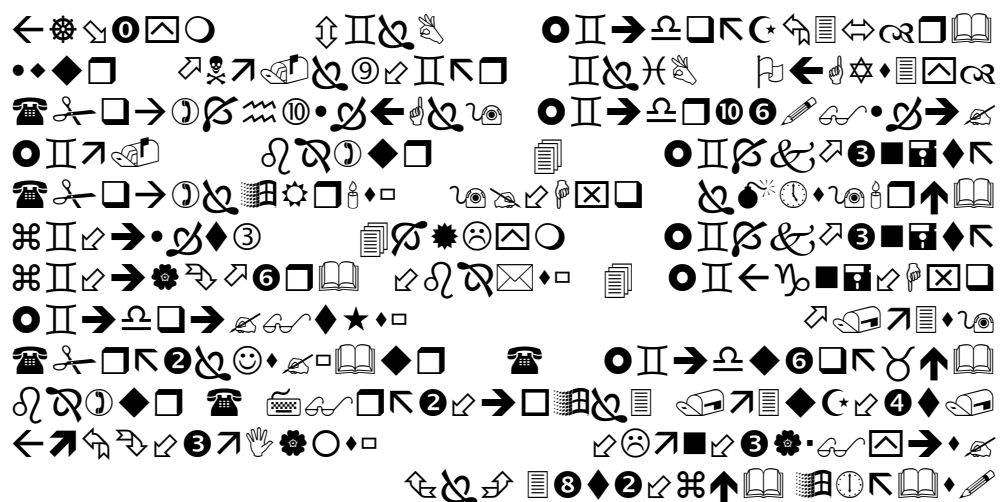
Termasuk talak *ba'in sughra* adalah

- Talak *qabla dukhul*
- Talak dengan penggantian harta atau yang disebut dengan *khulu'*
- Talak karena cacad badan, karena salah seorang dipenjara dan talak karena penganiyaan Akibat Talak *Ba'in Kubra*. Hukum talak *bain kubra* sama dengan talak *ba'in sughra*, yaitu memutuskan hubungan tali perkawinan antara suami dan isteri. Tetapi talak *bain kubra* tidak menghalalkan bekas suami merujuk mantan isterinya, kecuali sesudah ia menikah dengan laki-laki lain dan telah bercerai sesudah dikumpulinya, tanpa ada niat tahlil. Sebagaiman firman Allah SWT dalam surat al-Baqarah 230.



*Artinya : “kemudian jika si suami mentalaknya (sesudah Talak yang kedua), Maka perempuan itu tidak lagi halal baginya hingga Dia kawin dengan suami yang lain. kemudian jika suami yang lain itu menceraikannya, Maka tidak ada dosa bagi keduanya (bekas suami pertama dan isteri) untuk kawin kembali jika keduanya berpendapat akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Itulah hukum-hukum Allah, diterangkan-Nya kepada kaum yang (mau) mengetahui”. (Q.S. Al-Baqarah : 230).*

Perempuan yang menjalani ‘iddah talak ba’in, jika tidak hamil, ia hanya berhak memperoleh tempat tinggal (rumah), sedangkan jika ia hamil maka ia berhak tempat tinggal dan nafkah. Sebagaimana dalam surat al-Talaq ayat 6:



*Artinya : “tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. dan jika mereka (isteri-isteri yang sudah ditalaq) itu sedang hamil, Maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu Maka berikanlah kepada mereka upahnya, dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan Maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya“. (Q.S. Al-Talaq : 6)*

## 2. Akibat Li'an

Akibat *li'an* adalah terjadinya perceraian antara suami isteri. Bagi suami, maka isterinya menjadi haram untuk selamanya. Ia tidak boleh rujuk ataupun menikah lagi dengan akad baru. Bila isterinya melahirkan anak yang dikandungnya, maka anak itu dihukumkan tidak termasuk keturunan suaminya.<sup>17</sup>

### 3. Akibat *Fasakh*

Pisahny suami isteri akibat *fasakh* berbeda dengan yang diakibatkan oleh talak. Sebab talak ada talak bain dan ada talak *raj'i*. Talak *raj'i* tidak mengakhiri ikatan suami isteri dengan seketika sedangkan talak *ba'in* mengakhirinya seketika itu juga. Adapun *fasakh*, baik karena hal-hal yang datang belakangan maupun karena adanya syarat-syarat yang tidak terpenuhi, maka ia mengakhiri ikatan pernikahan seketika itu juga.

### 4. Akibat *khulu'*

*Khulu'* adalah perceraian dengan disertai sejumlah harta sebagai '*iwadh*' yang diberikan oleh isteri kepada suaminya untuk menebus diri agar terlepas dari ikatan perkawinan. Perceraian antara suami dan isteri akibat *khulu'*, suami tidak bisa meruju' isterinya pada masa '*iddah*'.

---

<sup>17</sup>A. Rahman Ghazali, *Lokcit*, h. 272-276

## **BAB IV**

### **PERCERAIAN DI KALANGAN KEPOLISIAN DAN HUKUM ISLAM**

#### **A. Motiv Perceraian Anggota Kepolisian Resor Kuantan Singingi.**

Berdasarkan dari ungkapan beberapa orang anggota Kepolisian Resor Kuantan Singingi, Briptu. Petra adalah seorang anggota Kepolisian Resor Kuantan Singingi yang bertugas di Polsek Kuantan Mudik, dalam naungan Bareskrim (Badan Reserse Kriminal) yang berkuat dengan berbagai macam tindak kriminal seperti, perampokan, pencurian, pembunuhan, asusila, narkoba, dan lain sebagainya.<sup>1</sup>

Briptu Petra yang kesehariannya dipanggil Papat, telah berkeluarga selama hampir 3 tahun, dan dikaruniai seorang anak. Papat bekerja terkadang tidak terjadwal, karena tugas seorang anggota Reserse sangat berat, seperti memburu penjahat, meninjau TKP (Tempat Kejadian Perkara), penyamaran di tempat-tempat hiburan dan lainnya. Jadi sedikit banyaknya Papat terpengaruh akan buruknya dunia kejahatan atau kriminal, seperti minum minuman keras, narkoba, judi, dan tindak kriminal lainnya.<sup>2</sup>

Dijelaskan oleh Papat, walaupun dia seperti itu namun dia tidak pernah memiliki WIL (wanita idaman lain). Sekembalinya Papat ke rumah ia selalu dimarahi oleh istrinya dan terkadang meluncur kalimat “ceraikan aku”, Papat tidak begitu mengindahkan perkataan istrinya tersebut, hingga

---

<sup>1</sup> Briptu.Petra, *Wawancara*, 23 April 2010

<sup>2</sup> Briptu.Petra, *Wawancara*, 23 April 2010

dalam waktu belakangan ini istrinya pergi dan kembali kerumah orang tuanya. Papat tidak ambil pusing dengan tingkah istrinya tersebut, dia tetap pada kehidupan bebasnya. Belakangan sang istri melapor kepada Ka.Polres meminta agar ia diizinkan bercerai dengan suaminya. Mendengar hal tersebut Ka.Polres melalui Waka.Polres memerintahkan untuk memanggil yang bersangkutan, ternyata setelah dibicarakan istri Papat tetap menghendaki perceraian, karena memang istri Papat sudah tidak tahan lagi dengan perilaku suaminya tersebut. Namun Waka.Polres enggan mengabulkan permintaan istri Papat, dengan alasan Papat berperilaku demikian karna kesalahan istri yang tidak pandai mensiasati suami. Namun sekembalinya kerumah Papat langsung mentalaq istrinya tanpa sepengetahuan dinas. Alhasil istrinya merasa sudah diceraikan, walaupun tanpa melauai proses hukum yang ada, baik di institusi POLRI maupun di pengadilan agama. 3 bulan sudah mereka bercerai namun tetap tidak ada tindak lanjut tentang status perkawinan yang bersangkutan, padahal desas-desus perceraian Papat dan istrinya sudah menjadi rahasia umum di jajaran Kepolisian Resor Kuantan Singingi. Secara dinas hingga kini status Papat dan istrinya masih sah sebagai suami istri dan masih masuk dalam daftar penerimaan gaji. Padahal masing-masing pihak telah menikah lagi.<sup>3</sup>

Bripka Suratman, mempunyai WIL (wanita idaman lain) yang lambat laun menjadi masalah besar dalam rumah tangganya bersama lia, karena perselingkuhannya bersama, sebut saja namanya bunga, diketahui

---

<sup>3</sup> Briptu.Petra, *Wawancara*, 23 April 2010



oleh sang istri maka sang istripun ikut membalas dengan berselingkuh dengan, sebut saja namanya anto, seorang guru. Karena tindakan saling membalas ini maka timbullah kesepakatan untuk bercerai, namun sang suami mengatakan, kita bercerai tapi pengurusan administrasi dan pengajuan cerai dilakukan setelah pensiun.<sup>4</sup>

Lain halnya dengan Aiptu. Zainal yang sama-sama bertugas di Polsek kuantan mudik, telah menikah dengan istrinya selama kurang lebih 27 (duapuluh tujuh) tahun, dan dikaruniai 3 (tiga) orang anak . Istri Zainal sebagai ibu rumah tangga mempunyai inisiatif untuk membuka kerja sampingan dengan membuka usaha rumah makan yang modalnya dipinjam kepada orang tuanya. Kurun waktu 2 (dua) tahun usahanya maju pesat dan Eti (biasa disapa) membuka cabang dan membuka toko perhisan, toserba (toko serba ada), dan toko pakaian yang cukup berkembang pula. Karena begitu banyak usaha yang ditangani Eti maka ia mempercayakan usaha-usahanya tersebut kepada pegawai yang dianggapnya dapat dipercayai.<sup>5</sup>

Berkat usahanya ini mereka dapat memenuhi kebutuhan-kebutuhan keluarga, seperti menyekolahkan anak-anaknya di sekolah dan universitas ternama. Suami Eti yang bertugas sebagai Ka.Polpos (kepala polisi pos), yang hanya bisa pulang 2 (dua) kali dalam seminggu, karena memang pos biasanya berada pada tempat-tempat yang jauh dari Polsek (polisi sektor) dan biasanya berada pada perbatasan daerah. Zainal Mulai berperilaku menyimpang karena kurangnya pengawasan dan juga jauh dari keluarga.

---

<sup>4</sup> Bripka.suratman, Lia, *Wawancara*, 23 April 2010

<sup>5</sup> Aiptu Zainal, *Wawancara*, 24 april 2010

Maka muncullah kebiasaan berjudi dan niat berselingkuh yang kebetulan di aminkan pula oleh seorang perempuan yang tinggal tak jauh dari posnya, yang dulunya perempuan ini seorang WTS (wanita tuna susila) yang ternyata juga orang kepercayaan di rumah makan istrinya. Belakangan suaminya sering datang ke rumah makan tersebut tanpa sepengetahuan istrinya, dan sering mengambil uang di kas rumah makan tersebut, untuk modal berjudi. Bahkan selepas para pekerja lain pulang, zainal dan perempuan tersebut berselingkuh di rumah makan milik istrinya tersebut. Sesuai kata pepatah “sepandai-pandainya menyembunyikan bangkai akhirnya keatahuan juga” ketika sang suami sedang berselingkuh dengan pegawainya, Eti datang berkunjung ke tempat usaha rumah makannya, seiring dengan laporan pemasukan bulanan yang semakin menurun, tak disangka ia mendapati suaminya bersama wanita tersebut.<sup>6</sup>

Akhirnya terjadilah pertengkaran hebat dan berujung kepada perpisahan, yang suami pergi bersama selingkuhannya yang juga langsung dipecat oleh Eti. Eti juga langsung melapor melalui WaKa.Polres bahwa ia ingin mengajukan perceraian karena perilaku suaminya yang kelewatan yang serta merta dijelaskan oleh Eti kepada WaKaPolres. Setelah beberapa lama kemudian sang suami pulang kerumah mereka, untuk mengambil beberapa perlengkapan dan pakaian, yang kebetulan pada waktu itu rumah sedang kosong. Ketika membuka lemari ia melihat kotak perhiasan istrinya, yang pada waktu itu ia langsung mengambil dan membawa perhisan-perhiasan

---

<sup>6</sup> Aiptu Zainal, *Wawancara*, 24 april 2010

itu, yang kalau ditaksir jumlahnya mencapai Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah). Sang istri yang merasa kehilangan barang, maka ia melaporkan ke Kepolisian bahwa telah terjadi pencurian di rumahnya, penyidik yang ditunjuk melakukan olah TKP (tempat kejadian perkara) dan tidak ditemukan upaya pembongkaran paksa pada pintu masuk, jendela ataupun lemari, penyidik mencari keterangan terhadap saksi yang berada di sekitar TKP, tentang siapa yang datang pada hari kehilangan yang dialami korban, maka diperoleh keterangan bahwa, “pak Zainal kemarin pulang”, yang bersangkutan dipanggil, saat ditanya perihal kehilangan yang terjadi pada istrinya, ia mengakui bahwa dia yang mengambil dan berdalih “bahwa barang yang diambil milik istri saya dan berarti juga milik saya” dan juga zainal dikonfrontir mengenai kisruh rumah tangganya, yang bersangkutan mengakui tentang kisruh rumah tangganya, dan bersedia menceraikan istrinya. Prosedur kedinasan dapat dijalankan dan perceraikan dapat diizinkan.<sup>7</sup> Setelah itu kasus dapat diselesaikan di Pengadilan Agama.

Seorang mantan anggota POLSEK Kuantan Mudik yang tidak ingin disebutkan namanya, menjelaskan bahwa, sewaktu ia masih bertugas ia mempunyai seorang istri dan dikaruniai dua orang anak. Istri nya berprofesi sebagai guru di sebuah Sekolah Dasar Negri, Namun berselang delapan tahun pernikahan mulai terjadi percekcoakan yang disebabkan oleh pihak

---

<sup>7</sup> Aiptu Zainal, *Wawancara*, 24 april 2010

suami yang selalu berselingkuh dengan “wanita penghibur”, minum minuman beralkohol, dan berjudi.<sup>8</sup>

Prilaku suami yang minyimpang dari norma-norma agama, ditambah lagi suami juga sering melakukan kekerasan terhadap istri, yang disertai pemukulan, tendangan hingga sang istri sering mengeluh kesakitan. Atas saran seorang teman, sang istri dianjurkan untuk melapor ke Kepolisian Resor, setelah menjalani pemeriksaan disertai laporan Laboratorium Forensik POLDA RIAU, dan hasil penyidikan membenarkan keterangan pelapor. Akhirnya pihak Dinas memperkarakan sang suami disidang militer atas prilaku dan tindakannya yang tidak sesuai dengan kode etik. Yang berujung pada, dikabulkannya permintaan cerai yang diajukan istri, dan pemecatan dirinya sebagai anggota Kepolisian, serta hukum kurungan selama 15 hari.<sup>9</sup>

Motif anggota Kepolisian Sektor Kuantan Mudik yang melakukan perceraian cukup beragam, diantaranya karena tidak ingin direpotkan oleh prosedur izin perceraian di Kepolisian maka mereka melakukan perceraian tanpa sepengetahuan dinas. Bahkan ada anggota yang baru melakukan perceraian secara resmi setelah pensiun dari Kepolisian. Dan juga ada anggota yang bercerai yang diawali kekerasan dalam rumah tangga.

---

<sup>8</sup> Wawancara, 25 April 2010

<sup>9</sup> Wawancara, 25 April 2010

## **B. Akibat Perceraian Anggota Kepolisian Sektor Kuantan Mudik**

### **1. Akibat yang Ditimbulkan Perceraian bagi Kepolisian**

Dikarenakan perceraian mereka tidak diketahui dinas, maka akibat yang ditimbulkan diantaranya:

1. Persoalan administrasi menjadi tidak jelas, dan mengenai tunjangan istri tetap diterima. Pengurusan administrasi, yang harus dilalui mulai dari menghadap atasan baik di tingkat sektor, resor bahkan daerah, dan juga mengurus surat ASABRI (asuransi angkatan bersenjata Indonesia), adalah surat jaminan untuk masa pensiun anggota polri, surat perumahan, dan lain sebagainya, hal – hal seperti inilah yang menyebabkan anggota kepolisian enggan melaporkan perceraian mereka, menghadap atasan merupakan hal yang sangat berat dilakukan oleh anggota polisi, apalagi mengenai perceraian.<sup>10</sup>

2. Keanggotaan istri sebagai Bhayangkari (organisasi istri-istri Polri), menjadi tidak jelas. Bhayangkari merupakan organisasi istri Polri yang lahir atas gagasan Ny. HL. Soekanto pada tanggal 17 Agustus 1949 di Yogyakarta, dan sebagai ketua pengurus besar dijabat oleh Ny. T. Memet Tanumidjaya.<sup>11</sup>

Pada tanggal 19 Oktober 1952 dilaksanakan konferensi Istri Polisi yang dihadiri oleh 27 perwakilan daerah, di mana telah diputuskan untuk bersatu dalam gerak perjuangan melalui wadah tunggal organisasi persatuan

---

<sup>10</sup> Brigadir Suhardi, *Wawancara*, 01 Maret 2011

<sup>11</sup> Ny. Suhardi, *Wawancara*, 01 Maret 2011

istri Polri Bhayangkari dan tanggal tersebut ditetapkan pula sebagai Hari Anak-Anak Kepolisian.<sup>12</sup>

Berselang empat tahun diadakan kongres kedua pada tanggal 25 Desember 1956, telah disahkan Cupu Manik Astagina sebagai lambang Bhayangkari.

Kongres ketiga dilaksanakan tahun 1959, pada kesempatan tersebut disahkan Himne Bhayangkari gubahan RM. Sudjasmin dengan syair oleh Ny. SA. Legowo, sedangkan Mars Bhayangkari disahkan pada rapat kerja Dewan Pimpinan Bhayangkari tahun 1970 di Jakarta. Kongres kelima tahun 1963 menetapkan bahwa tanggal 19 Oktober 1952 merupakan Hari Kesatuan Gerak Bhayangkari.<sup>13</sup>

Pada tanggal 15 April 1964 ketiga istri angkatan dan Polri bergabung dalam satu wadah organisasi yang disebut Dharma Pertiwi, di mana pada waktu itu terpilih sebagai ketua adalah Ny. B. Soewito dari Bhayangkari, sedangkan Mars Bhayangkari disahkan pada Rapat Kerja Dewan Pimpinan Bhayangkari pada tahun 1970 di Jakarta. Sesuai kebijaksanaan pimpinan Hankam tentang organisasi ABRI fungsional menjadi fungsional, Ketua Umum Bhayangkari pertama yang secara fungsional dijabat oleh Ny. Muhammad Hasan.<sup>14</sup>

Tahun 1974 pada Musyawarah Pusat Bhayangkari IX, sebutan persatuan potensi Wanita Polri Bhayangkari berubah menjadi Persatuan Istri

---

<sup>12</sup> Ny. Ben Hardi, *Wawancara*, 01 Maret 2011

<sup>13</sup> Ny. Ben Hardi, *Wawancara*, 01 Maret 2011

<sup>14</sup> Ny. Ben Hardi, *Wawancara*, 01 Maret 2011

Anggota Polri Bhayangkari dan merupakan organisasi ekstra struktural yang berada dibawah pembinaan Polri.

Dengan adanya tuntutan reformasi, guna ditegakkannya supremasi hukum dan Polri Mandiri, maka pada tanggal 25 April 2001 dengan keluarnya Kepres No. 54 tahun 2001 di mana jabatan Waka Polri ditiadakan, dan berubah menjadi Sekjen Polri kemudian pada tanggal 21 Juni 2001 keluar kembali Kepres No.77 tahun 2001 tentang diadakan kembali jabatan Waka Polri, namun tidak berjalan lama dan segalanya harus berubah, sehingga keluar pula Kepres No.97 tahun 2001 tentang pencabutan kembali struktur Jabatan Waka Polri.<sup>15</sup>

Apabila seorang istri Polri bercerai maka secara otomatis keanggotaanya sebagai anggota Bhayangkari akan dicopot, dan segala bentuk aktifitas, ataupun kegiatan bhayangkari tidak dibenarkan untuk mengikuti.<sup>16</sup>

3. Melanggar sumpah prajurit ; catur prasetya, dan tribrata.<sup>17</sup>
4. Sedikit banyaknya masalah – masalah yang terjadi dalam rumah tangga terbawa dalam pekerjaan, yang akhirnya dalam menangani suatu perkara kriminal hingga melampiaskan amarah kepada pelaku tindak kejahatan.<sup>18</sup>

---

<sup>15</sup> Ny. Ben Hardi, *Wawancara*, 01 Maret 2011

<sup>16</sup> Ny. Ben Hardi, *Wawancara*, 01 Maret 2011

<sup>17</sup> AKP Ben Hardi, *Wawancara*, 01 Maret 2011

<sup>18</sup> AKP Ben Hardi, *Wawancara*, 01 Maret 2011

## C. Analisis

### 1. Faktor Pekerjaan

Dalam dunia Kepolisian sangat erat hubungannya dengan dunia Kejahatan atau kriminal, terutama Anggota yang bertugas dalam bidang BARESKRIM, yang di dalamnya ada sub.NARKOBA,KORUPSI dan lainnya, tugas penyamaran ditempat – tempat hiburan seperti di klub malam atau diskotik, ataupun tempat prostitusi, demi mendapatkan informasi, keterangan mengenai kasus yang diselidiki, banyak polisi-polisi Reserse (polisi yang bertugas dalam tindak kriminal) yang tersesat dalam artian, terjerumus dalam buruknya dunia kejahatan, bahkan ada yang menjadi pengedar narkoba dan lain sebagainya. Kurangnya iman ataupun benteng diri, menjadi penyebab utama perubahan sikap prilaku anggota polisi itu sendiri, ini berdampak pada proses pencarian jodoh bagi yang masih lajang, dan kehidupan berumah tangga anggota polisi.

Allah menganugerahkan nafsu pada manusia. Karena manusia tercipta dari ruh kemuliaan dan lumpur, maka tarik menarik dari dua arah yang berlawanan itu begitu kuat, sehingga diperlukan suatu upaya mengaktualkan kesucian diri. Allah menyediakan rizki yang melimpah dan lawan jenis yang menarik dan memikat setiap orang. Akan tetapi demi menegakan kedamaian di muka bumi, dibuatlah aturan, yang dikenal dengan syara'. Manusia sama sekali tidak dilarang menikmati kesenangan duniawi, rizki ataupun lawan jenis, asalkan dengan cara yang halal dan baik.<sup>19</sup>

---

<sup>19</sup> Drs.K.H.Muslim Nurdin.dkk,*Moral dan Kognisi Islam*,(Jawa Barat: alfabeta,edisi revisi,2001). h.230



## 2. Faktor Keuangan

Banyaknya kekisruhan dalam rumah tangga polisi didominasi oleh pengaruh penugasan polisi itu sendiri, tapi tidak sedikit pertengkaran berawal dari latar belakang ekonomi, dengan gaji pokok yang kecil dan ditambah tunjangan istri dan anak, apalagi anggota yang tinggal di asrama, tingkat kecemburuan sosial terhadap tetangga yang pangkatnya sama, tugasnya sama tapi kenapa hidupnya bisa mewah, alasan-alasan seperti ini yang biasanya menjadi alasan menuntut suami dengan pertanyaan ”kenapa mereka bisa kita kok tidak bisa”, hal seperti ini membuat suami sebagai Anggota polisi merasa terganggu dan mencari job sampingan yang menyimpang dari koridor hukum yang berlaku. Kemajuan yang dimiliki orang lain membuatnya tidak tentram.<sup>20</sup>

Hukum Islam adalah salah satu aspek ajaran Islam yang menempati posisi penting dalam pandangan umat Islam, karena ia merupakan manifestasi paling kongkrit dari hukum Islam sebagai sebuah agama . Sedemikian pentingnya hukum Islam dalam skema doktrinal Islam, sehingga seorang orientalis, Joseph Schacht, menilai bahwa “*mustahil memahami Islam tanpa memahami Hukum Islam*”.<sup>21</sup>

Kasus Briptu Petra, yang tidak melaporkan perceraianya kepada kedinasan, yang jelas – jelas merugikan Negara, baik dalam keuangan dan administrasi maupun melanggar ketentuan yang berlaku.

---

<sup>20</sup> *Ibid*, h.257

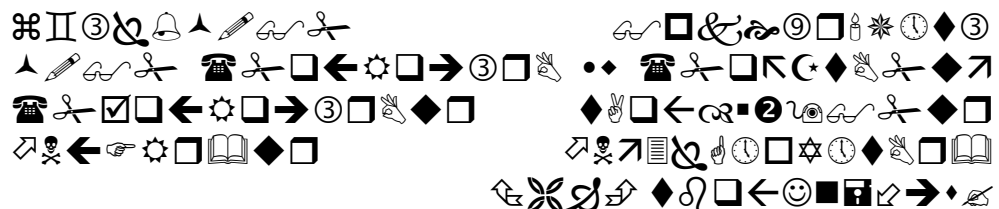
<sup>21</sup> Abdul Halim Barkatullah & Teguh Prasetyo ,*Hukum Islam Menjawab Tantangan Zaman yang Terus Berkembang*, Pustaka Pelajar Yogyakarta., Cet.1 2006, h.145.

Kasus Bripka suratman, ini dilakukan karena enggannya mereka melakukan pengurusan perceraian di Kedinasan. Jadi apabila sang suami pensiun maka pengurusan perceraian dapat dilakukan langsung di pengadilan agama, karena sang suami sudah tidak berprofesi sebagai polisi dalam arti kata telah menjadi warga sipil biasa.

Kasus Aiptu Zainal, berjudi, mencuri dari istri dan mempunyai WIL, merupakan gambaran buruk oknum kepolisian yang terjadi dikarenakan kurangnya pengawasan, bimbingan, dan juga kesempatan yang terkadang memberi peluang terjadinya penyelewengan baik dalam tugas ataupun, rumah tangga.

Kasus keempat, yang diawali tindak kekerasan dan mengakibatkan istri terluka baik fisik maupun mental, serta diikuti laporan istri kepada atasan, dan diakhiri dengan terjadinya perceraian.

Dalam islam apabila seseorang itu tidak menepati janji, dalam hal ini terhadap Negara, disebut *khianat* , dalam surah Al-Anfaal ayat 27 dijelaskan larangan mengkhianati sesama manusia beriringan dengan mengkhianati Allah, sebagai berikut :



Artinya :. “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul (Muhammad) dan (juga) janganlah kamu mengkhianati amanat-amanat yang dipercayakan kepadamu, sedang kamu mengetahui”. (QS. Al-Anfaal : 27)

Menurut ar-Raqib al-Isfahani, seorang pakar bahasa arab, khianat adalah sikap tidak memenuhi suatu janji atau suatu amanah yang dipercayakan kepadanya.<sup>22</sup>

Dengan memakan gaji yang tidak semestinya maka dalam hal ini Negara dirugikan. Maka kemandirian penegak hukum, yang terbebas dari kepentingan pihak luar dan peningkatan kemampuan aparat penegak hukum, baik keahlian maupun moralitas dan etika, tidak akan tercapai.<sup>23</sup>

Perceraian tidak bisa dipisahkan dari perkawinan, tak ada perceraian tanpa diawali perkawinan. Perkawinan adalah suatu ikatan lahir dan bathin antara seorang laki-laki dan seorang wanita untuk membina rumah tangga yang *sakinah, mawaddah warahmah*. Namun pada saat tujuan itu tidak tercapai, maka perceraian merupakan jalan keluar (*way out*) terakhir yang mesti ditempuh. Perceraian tidak dapat dilakukan kecuali telah ada alasan-alasan yang dibenarkan oleh agama dan undang-undang. Dalam hukum Islam, alasan-alasan perceraian itu mengalami perkembangan sesuai dengan setting sosial yang melingkupi hukum tersebut. Karena itu, dalam skripsi ini ini, penulis berupaya menyoroti dan memaparkan motif perceraian dan akibat perceraian menurut Perspektif hukum Islam.

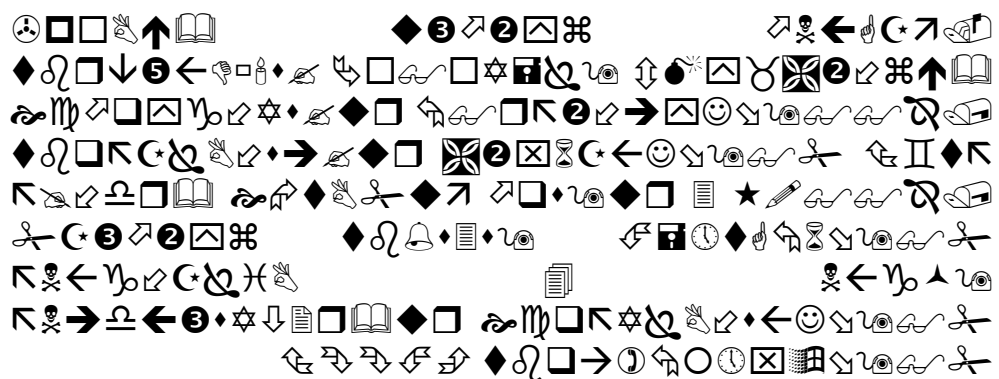
Motivasi masing – masing personil melakukan perceraian sangat beragam, mulai dikarenakan enggan berurusan administrasi, hingga adanya perselingkuhan, dan juga diikuti dengan tindakan kriminal.

---

<sup>22</sup> Muhamad darwis, Hendri Sayuti, Fiqh Anti Korupsi, (Pekanbaru, Suska Press, 2008) h.72

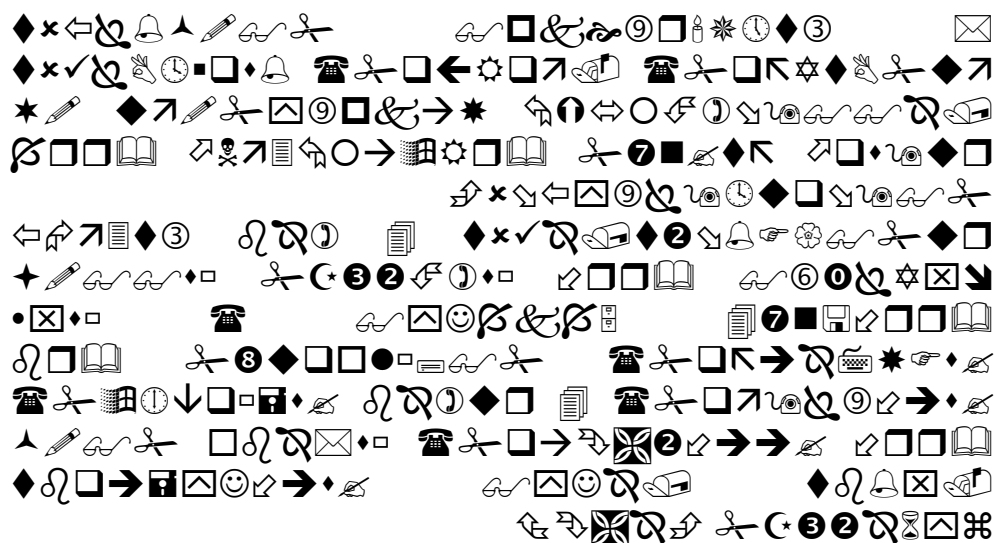
<sup>23</sup> *Ibid* h.88

Syari'at Islam memberikan motivasi yang kuat kepada umat untuk senantiasa menegakan keadilan di tengah masyarakat yang direalisasikan dalam suatu timbangan manusiawi yang mampu menempatkan sesuatu sesuai dengan keharusannya. Ia harus tegak berdiri menegakan keadilan dan menyuarakan kebenaran di manapun ia berada dengan berpijak kepada realitas yang ada disekeliling nya, firman Allah:



Artinya : “kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada yang ma'ruf, dan mencegah dari yang munkar, dan beriman kepada Allah. Sekiranya ahli kitab beriman, tentulah itu lebih baik bagi mereka, di antara mereka ada yang beriman, dan kebanyakan mereka adalah orang-orang yang fasik”. (Q.S. Ali Imran : 110)

Di surah lain Allah juga menegaskan:



*Artinya : Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang yang benar-benar penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah biarpun terhadap dirimu sendiri atau ibu bapa dan kaum kerabatmu. jika ia (orang yang tergugat atau yang terdakwa) Kaya ataupun miskin, Maka Allah lebih tahu kemaslahatannya. Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. dan jika kamu memutar balikkan (kata-kata) atau enggan menjadi saksi, Maka Sesungguhnya Allah adalah Maha mengetahui segala apa yang kamu kerjakan. (Q.S. An-Nisa' : 135)*

Bercerai tanpa sepengetahuan dinas, perceraian ini dilakukan tanpa melalui proses di kepolisian di mana institusi tempat ia bekerja, dan juga tidak diketahui hakim sesuai dengan Kompilasi Hukum Islam di Indonesia :

Pengadilan agama Pasal 115:  
Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama setelah Pengadilan Agama tersebut berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.<sup>24</sup>

Dalam bab 1 dijelaskan bahwa pengajuan izin bercerai harus melalui izin atasan, para anggota yang melakukan perceraian tanpa sepengetahuan dinas menjelaskan, bahwa proses perceraian yang harus dilalui sangat rumit dan terlalu panjang, sehingga merugikan waktu dan biaya, oleh karena itu mereka bercerai tanpa diketahui komandan satuan mereka, hal ini terus – menerus berlangsung, tanpa ada kejelasan apa dan bagaimana status hukum perkawinan mereka.

Dikarenakan perceraian mereka tidak diketahui dinas, maka persoalan administrasi menjadi tidak jelas, seperti pemasalahan gaji, tunjangan, biaya lauk – pauk yang ditanggung Negara menjadi tidak jelas, sebagaimana yang diatur dalam Undang – Undang Kepolisian Negara, Peraturan Pemerintah

---

<sup>24</sup> *Kompilasi Hukum Islam*

Republik Indonesia Nomor 29 tahun 2001 Tentang Peraturan Gaji Anggota  
Kepolisian Negara Republik Indonesia :

BAB III  
TUNJANGAN  
Pasal 11

- (1) Di samping gaji pokok kepada Anggota diberikan :
  - a. tunjangan keluarga yang terdiri dari tunjangan istri/suami dan tunjangan anak;
  - b. tunjangan jabatan.
- (2) Selain tunjangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) kepada Anggota dapat diberikan tunjangan pangan dan lain – lain.<sup>25</sup>

Dalam peraturan di atas dapat dipahami, apabila bercerai maka tunjangan istri tidak diperoleh lagi, tentunya penghasilan perbulan akan dipotong 10% untuk kedepannya sesuai :

Pasal 12

- (1) Anggota yang beristri/ bersuami diberikan tunjangan istri/suami sebesar 10% (sepuluh persen) dari gaji pokok.<sup>26</sup>

Cerai juga dapat dilakukan oleh pihak dinas, dikarenakan pasangan dari anggota Kepolisian mengikuti organisasi terlarang atau menjadi mata-mata pihak tertentu yang merupakan ancaman bagi keamanan Negara. Sesuai dengan Petunjuk Teknis: JUKNIS/01/III/1981 tentang Perkawinan, Perceraian dan Rujuk bagi Anggota Polri pada Pelaksanaan Perkawinan Punt h dan i yang berbunyi:

- h. Penolakan pemberian izin atas permohonan izin kawin dilakukan oleh Pejabat yang berwenang tersebut, dalam Pasal 13 KEP/01/I/1980 dengan pemberitahuan kepada yang bersangkutan secara tertulis dengan disertai alasan-alasannya.
- i. Penolakan pemberian izin dimaksud punt h. di atas dilakukan apabila:

---

<sup>25</sup> Undang-undang Kepolisian Negara, (UU RI NO.2 TH. 2002) BAB III Pasal 12 hal.129

<sup>26</sup> *Ibid.* h.130

- 1) Tabiat, kelakuan dan reputasi calon suami/istri yang bersangkutan tidak sesuai dengan kaidah-kaidah (norma) kehidupan yang berlaku dalam masyarakat.
- 2) Ada kemungkinan bahwa perkawinan itu akan dapat merendahkan martabat ABRI atau mengakibatkan kerugian terhadap nama baik ABRI ataupun Negara baik langsung maupun tidak langsung.
- 3) Persyaratan kesehatan tidak dipenuhi.<sup>27</sup>

Petunjuk pelaksanaan bhayangkari (Juklak 04) tentang pelanggaran sanksi dan rehabilitasi bagi anggota bhayangkari.

Hasil keputusan musyawarah bhayangkari ke XIX tanggal 17 juni 2005.  
(Pemberian sanksi terhadap bhayangkari yang bisa diceraikan oleh dinas)

1. mengikuti organisasi terlarang
2. menjadi mata-mata

(Hasil rancangan penyempurnaan keputusan musyawarah bhayangkari yang ke XVIII tgl 27 maret 2002)

---

<sup>27</sup> *Op. cit.* h. 92

## **BAB V**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **A. Kesimpulan**

1. Perceraian adalah jalan keluar terakhir (*way out*) untuk mengakhiri perkawinan yang sudah tidak mungkin lagi dapat dipertahankan dan perceraian ini dilakukan demi kebahagiaan yang dapat diharapkan sesudah terjadinya perceraian. Perceraian hanya dapat dilakukan apabila telah terbukti adanya alasan-alasan yang dapat dibenarkan oleh hukum Agama dan Undang-undang yang berlaku.
2. Sadar atau tidak dunia kejahatan sedikit banyaknya telah mempengaruhi sifat, sikap, dan perilaku anggota Polri itu sendiri, maka dipandang perlu adanya pembinaan berkala.
3. Perceraian tanpa sepengetahuan dinas, akan berakibat merugikan bagi Negara dan juga berakibat buruk bagi anggota itu sendiri.
4. Kekerasan dalam rumah tangga dapat berakibat buruk bagi perkembangan mental anak maupun pribadi orang tua.



**B. Saran**

1. Untuk lebih terawasinya setiap perceraian dan kendala-kendala dalam menghadapi permasalahan rumah tangga, diharapkan institusi KEPOLISIAN mengadakan konsultan perkawinan di setiap polsek, dan pengawasan yang mendasar terhadap anggotanya yang “nakal” (menyimpang dari koridor hukum).
2. hendaknya diadakan bimbingan perkawinan, sebulan sekali selama setahun bagi anggota yang baru menikah.
3. Hendaknya selalu diadakan pemeriksaan berkala untuk kesehatan bagi para anggota, mencegah para anggota untuk berperilaku menyimpang seperti meminum minuman terlarang, penggunaan narkotik dan obat-obatan terlarang.
4. Pengajian hendaknya tidak hanya dihadiri oleh kaum ibu-ibu Bhayangkari saja, namun juga dihadiri oleh Anggota KEPOLISIAN itu sendiri, karena masalah rumah tangga tidak dijalani oleh salah satu pihak saja, maka dari pada itu, pihak anggotanya juga berpartisipasi, agar terciptanya keharmonisan dalam berumah tangga.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Halim Barkatullah dan Teguh Prasetyo, *Hukum Islam Menjawab Tantangan Zaman yang Terus Berkembang*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2006.
- Abdul Kadir Muhammad, *perkembangan Hukum Keluarga di Beberapa Negara Eropah*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1998
- Abdul Manan, *Problematika Perceraian Karena Zina dalam Proses Penyelesaian Perkara di Lingkungan Peradilan Agama*, Mimbar Hukum No 52 Th XII Mei- Juni 2001, Jakarta, al-Hikmah & DITBINBAPERA Islam.
- \_\_\_\_\_, *Reformasi hukum Islam di Indonesia*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006
- Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, Kencana, Jakarta, 2006
- Al Ghazali, Shalih Bin Ahmad, *Romantika Rumah Tangga*, Cendekia, Jakarta, 2004
- Busthanul Arifin, *Transformasi Hukum Islam ke Hukum Nasional*, al-Hikmah Jakarta, 2001
- Darwis, Muhammad & Sayuti, Hendri, *Fiqh Anti Korupsi*, Suska Press, Pekanbaru, 2008
- Departemen Agama Republik Indonesia, *Alquran dan Terjemahannya*, PT. Tanjung Mas Inti, Semarang, 1995
- Fauzil Adhim, Mohammad, *Mencapai Pernikahan Barakah*, Mitra Pustaka, Yogyakarta, 2006
- Ghazali, Abdul Rahman. *Fiqh Munakahat*. Bogor: Prenada Media. 2003.
- Halim, Abdul, *Peradilan Agama dalam Politik Hukum Islam*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002.
- Idris Ramulyo, Mohd, S.H, M.H, *Hukum Perkawinan Islam*, Bumi Aksara, Jakarta, 1996
- Kamus Besar Bahasa Indonesia, 2010.
- Karjadi, M, *Polisi*, Bogor: Politeia, 1978.
- Lihawa, Ronny, Drs., *Memahami Community Policing (judul asli : Understanding Community Policing, a Framework for Action)*, YPKIK, 2005.
- Muhammad Ali as-Shabuni, *Tafsir Rawa'iul Bayan fi Ayat al-Ahkam*, Jilid II, Dar al-Fikr, Beirut, Tt.
- Nazir, N, *Metode Penelitian*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1988.
- Osman, Rathi, DR., *Negara dalam Sunnah Rasulullah*, Kalam Mulia, Jakarta, 1990
- Rifyal Ka'bah, *Permasalahan Perkawinan*, Varia Peradilan No. 271 Th XXII Juni 2008, Jakarta, IKAHI .
- PETUNJUK PELAKSANAAN TUGAS KEPOLISIAN
- PETUNJUK PELAKSANAAN BHAYANGKARI, Organisasi istri anggota POLRI.
- Reksodiputro, Mardjono, *Buku Kedua: Kriminologi dan Sistem Peradilan Pidana*, LKUI, 1994.
- Rofiq, Ahmad, *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003.

- Ropaun Rambe & A. Mukri Agafi, *Implementasi Hukum Islam*, Jakarta: Perca Jakarta, 2001.
- Salim, Peter, & Salim, Yenny. *Kamus bahasa Indonesia kontemporer*, Jakarta: Modern English press. 2002.
- Satria Effendi M Zein, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer*, Kencana, Jakarta, 2004
- Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Jilid II, Dar al-Fikri, Beirut, Th 1983.
- Siegel, S. *Statistik Non Parametrik untuk Ilmu-ilmu Sosial*, Jakarta: Gramedia, 1988.
- Singarimbun, M., Effendi, S. *Metode Penelitian Survei*, Jakarta: LP3S, 1985.
- Sudjana, *Metoda Statistika*, Edisi kelima. Bandung: Tarsito, 1989.
- Sutanto, Drs. Jend. Pol. *POLMAS: Paradigma Baru Polri*. YPKIK. 2006.
- Taufiq, *Peradilan Keluarga Indonesia*, Mahkamah Agung RI, Jakarta, 2001.
- Undang-Undang Pokok Perkawinan Beserta Peraturan Khusus untuk Anggota ABRI; Anggota POLRI; Pegawai Kejasaaan; Pegawai Negri Sipil. Cetakan keenam, Jakarta: Sinar Grafika, 2006.
- UNDANG-UNDANG KEPOLISIAN NEGARA (UU RI NO.2 TH.2002). Cetakan pertama, Jakarta; Sinar Grafika. 2003.
- Yahya Harahap, *Beberapa Permasalahan Hukum Acara pada Peradilan Agama*, al-Hikmah, Jakarta, 1975

## **DAFTAR LAMPIRAN**

LAMPIRAN 1	Pedoman Wawancara
------------	-------------------

## **DAFTAR TABEL**

Tabel 1	Daftar Nama Kepala Kepolisian Sektor Kuantan Mudik	
	Periode 1959 – Sekarang .....	34
Tabel 2	Daftar Nama Personil Kepolisian Sektor Kuantan Mudik	
	Tahun 2010 .....	35

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1	Logo Kepolisian Negara Republik Indonesia.....	36
Gambar 2	Struktur Organisasi Kepolisian Negara Republik Indonesia Tahun 2007 .....	37
Gambar 3	Peta Kepolisian Negara Republik Indonesia Tahun 2007 .....	38
Gambar 4	Struktur Organisasi Kepolisian Daerah Riau Tahun 2007 .....	38
Gambar 5	Peta Kepolisian Daerah Riau Tahun 2007.....	39
Gambar 6	Struktur Organisasi Kepolisian Sektor Kuantan Mudik Tahun 2010 .....	40

## **LAMPIRAN 1**

### **PEDOMAN WAWANCARA**

Penulis mengadakan wawancara dengan anggota POLISI yang bercerai, dan Ka.Polsek Kuantan mudik, dengan bentuk pertanyaan sebagai berikut:

1. Siapa nama anda?
2. Dimana anda berdomisili?
3. Apa pekerjaan anda?
4. Berapa jumlah anak anda?
5. Apakah anda bercerai?
6. Kenapa anda bercerai?
7. Bagaimana anda bercerai?
8. Apakah ada hambatan, saat anda melakukan pengurusan perceraian?
9. Bagaimana anda bercerai bila sulit mendapatkan izin pimpinan ditempat anda bekerja?
10. Apa yang anda lakukan bila tidak mendapatkan izin bercerai dari atasan ditempat anda bekerja?
11. Berapa jumlah personil di Polsek Kuantan Mudik?
12. Apa saja unit yang ada?
13. Apa saja tugas unit–unit tersebut?
14. Apakah ada kontrol pimpinan terhadap perilaku anggota yang menyimpang?
15. Apakah ada pengaruh pekerjaan terhadap perilaku anggota anda?

## BIOGRAFI



Penulis dilahirkan di Rengat pada tanggal 07 Januari 1985, sebagai anak pertama dari tiga bersaudara. Merupakan anak dari pasangan Mukhlisin dan As-Dany.

Adapun jenjang pendidikan yang pernah ditempuh oleh penulis antara lain:

1. Tahun 1991 – tahun 1992 : SDN 020 Cinta Raja Kec. Sail
2. Tahun 1992 – tahun 1997 : SDN 002 Banjar Padang Kec. Kuantan Mudik
3. Tahun 1997 – tahun 2000 : MTs Negeri Lokal Simpang Tiga
4. Tahun 2000 – tahun 2003 : MAN 2 Model Pekanbaru
5. Tahun 2003 : Terdaftar sebagai mahasiswa jurusan Ahwal Al-Syakhshiyah Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Pekanbaru dan dinyatakan Lulus mengikuti munaqasyah dalam Sidang Panitia Ujian Sarjana Program S1 di Fakultas Syari'ah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau pada tanggal 23 Maret 2011.